

TABLOID SinarTani

TERBIT HARI RABU
Harga: Rp 16.000
Rp 480/Tahun (48 edisi)
www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.com

Edisi 25 Juli 2025
No. 4092
Rp 480/hun LV



10 Kiman Siregar Membangun Bisnis Tak Melulu Soal Uang

MUNAS HKTI MOMENTUM KONSOLIDASI PETANI



www.tabloidsinartani.com



tabloidsinartani.com



@SinarTaniST



tabloidsinartani



SINTA TV

YANMAR

COMBINE HARVESTER
AW70VW



YANMAR
SERVICE
PORTAL APP
SMARTASSIST



Google Play



App Store

Dilengkapi SMARTASSIST (GPS Canggih)

Mesin Kuat dan Irit Bahan Bakar

Mudah Memanen Padi Rebah

Tangguh di Lahan Dalam

Awet dan Ber-TKDN

Chasis Tinggi



Yanmar Siregar Indonesia



EDITORIAL

HKTI dan Kesejahteraan Petani

Selamat Munas HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Sebagai salah satu organisasi petani yang cukup besar di Indonesia, HKTI telah menempuh perjalanan panjang. Sejak resmi didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta, HKTI telah menjadi pemersatu dari 14 organisasi petani yang sebelumnya berjalan secara terpisah.

Pembentukan HKTI sendiri tak lepas dari latar belakang sejarah panjang dinamika organisasi petani di Indonesia. Pada tahun 1968, tercatat setidaknya ada 15 organisasi petani yang aktif, seperti PETANI, PERTANU, PETISI, GTI, dan SAKTI. Melihat kondisi yang terfragmentasi tersebut, pemerintah saat itu mendorong terbentuknya Badan Kerja Sama Tani (BKS-Tani) sebagai upaya awal untuk menyatukan kekuatan organisasi petani.

Dari sinilah benih-benih pembentukan HKTI mulai tumbuh. Kini HKTI telah berusia 52 tahun, usia yang tak muda lagi, bahkan menjadi usia yang matang bagi sebuah organisasi petani. Apalagi organisasi tersebut pernah dipimpin orang-orang 'besar' yang banyak berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan.

Sebut saja, Siswono Yudo Husodo mantan Menteri di era Pemerintahan Soeharto. Kemudian ada Prabowo Subianto yang kini menjadi orang nomor satu di Indonesia. Kemudian Fadli Zon yang kini menjadi salah satu menteri di Pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Dalam perjalanan organisasi ini memang tak semulus. Duri tajam dalam perjalanan adalah ketika lahir organisasi dengan nama yang sama HKTI. Pasca kepemimpinan Siswono Yudo Husodo, Oesman Sapta Odang atau dikenal dengan Oso membuat HKTI tandingan dengan HKTI yang dipimpin Prabowo Subianto. Ini bukan rahasia lagi.

Terlepas dari berbagai alasan, keberadaan dua HKTI menjadi dinamikan tersendiri bagi organisasi petani di Indonesia. Keduanya tetap berjalan hingga lebih dari 20 tahun. Meski selama perjalanan dua organisasi petani itu sempat akan rukuk.

Namun ketika Prabowo Subianto, yang kini sebagai Dewan Pembina HKTI menjadi Presiden RI, HKTI Oso yang kini diketuai Jenderal Moeldoko, ada wacana kembali dua HKTI tersebut bersatu. Pada Munas HKTI X yang akan berlangsung pada 24-26 Juni 2025 diharapkan akan menjadi sejarah baru bagi HKTI.

Semoga niat baik dan tujuan yang sama untuk pembangunan pertanian menjadi satu misi yang sama. Semua tahu, salah satu pekerjaan rumah (PR) saat ini adalah kesejahteraan petani yang perlu menjadi perhatian utama pemerintah dan organisasi petani.

Masih banyak petani yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di pedesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen. Secara nasional jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan Rumah Tangga Pertanian (RTP) pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang.

Sementara itu Hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 BPS hanya 46,84% petani menggunakan teknologi modern untuk budidaya pertanian. Bahkan dilihat dari jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Gurem, terjadi peningkatan sebanyak 2,64 juta Rumah Tangga (18,54%) dalam sepuluh tahun terakhir. Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem adalah rumah tangga yang menggunakan/menguasai lahan (pertanian dan tempat tinggal) kurang dari 0,50 ha. Masalah kesejahteraan petani masih menjadi PR bersama.



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Freepik Diolah

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter :** Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi :** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan :** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan :** Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi :** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari

Penerbit : PT. Duta Karya Swasta; **Komisaris Utama :** DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris :** Ir. Achmad Saubari Prasodjo

Direktur Utama : DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur :** Ir. Mulyono Machmur, MS

Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan : Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205

Email : redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit :** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak :** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga :** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan :** FC Rp. 8000/mmk, BW Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran :** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI 46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN :** 0852-8586; **Percetakan :** PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika



Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

**SELAMAT
MUNAS HKTI**

Selamat Munas HKTI. Saya baca HKTI lahir pada 27 April 1973. Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan swasembada pangan.

Bahkan Presiden mempercepat target swasembada pangan dipercepat. Pada awalnya ditargetkan 4 tahun, kemudian menjadi 3 tahun, terakhir menjadi 1 tahun, bahkan 6 bulan. Untuk mencapai target tersebut kita tidak bisa bekerja yang biasa-biasa saja. Mindset kita harus ubah, kita tidak bisa hanya omon-omon saja, kita harus bertindak.

Alhamdulillah, saat ini stok beras kita saat ini mencapai 4 juta ton. Ini pertama kali dalam sejarah dan tidak pernah ada, kita berhasil stop impor beras. Produksi beras kita melompat dari 30 juta ton menjadi 34,6 juta ton. Bahkan FAO memprediksi produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton.

Proyeksi produksi FAO tersebut menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Jumlah ini merupakan rekor tertinggi Indonesia dalam tiga tahun terakhir, sekaligus menjadi salah satu lonjakan tertinggi di antara negara-negara produsen utama. Bila proyeksi tersebut terwujud, realisasi produksi Indonesia melampaui target pemerintah sebesar 32 juta ton.

Dalam laporan tersebut, FAO menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Bangladesh. Produksi Indonesia diperkirakan naik 4,5 persen dibanding musim sebelumnya yang sebesar 34 juta ton. Kenaikan ini menandai pemulihan signifikan yang dilakukan pemerintah setelah sempat mengalami penurunan pada 2024/2025.

Capaian ini merupakan bukti nyata dari komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan swasembada. Dengan kondisi geopolitik global saat ini yang tidak menentu, sangat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.

Kami melakukan berbagai terobosan strategis guna mendorong peningkatan produksi secara eksponensial. Kami mengerahkan seluruh jajarannya untuk mempercepat tanam, menyediakan benih unggul, memperbaiki irigasi, memasifkan pompanisasi, serta memastikan pupuk tersalurkan tepat waktu.

Langkah strategis lainnya, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, serta menghapus kebijakan rafaksi guna meningkatkan penyerapan gabah petani.

Dengan kebijakan ini, cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 4,15 juta ton, dan harga gabah di tingkat petani tetap stabil. Hasilnya, petani dapat menikmati hasil panen dengan layak dan tetap semangat untuk terus menanam. Kebijakan harga di tingkat petani sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan peningkatan produksi beras nasional.

Kami juga mendorong HKTI untuk tidak hanya fokus pada program budidaya, tetapi juga mulai mengembangkan kemitraan dengan investor, BUMN, hingga koperasi desa dalam mengelola pabrik-pabrik pengolahan, unit pengemasan, distribusi, dan akses pasar digital.

Kami ajak HKTI untuk terlibat aktif dalam hilirisasi komoditas pertanian strategis, sebagai langkah konkret mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka lapangan kerja secara masif. **



PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Biochar Jadi Jurus Sakti Pertanian Cerdas Iklim

Biochar hadir sebagai solusi jitu menghadapi perubahan iklim. Si hitam ajaib ini tak hanya suburkan tanah, tapi juga kurangi emisi dan dongkrak panen petani, pertanian cerdas iklim kini jadi nyata!

Di tengah tantangan perubahan iklim global yang makin nyata, sektor pertanian nasional menghadapi ujian besar. Pola musim yang tidak menentu, naiknya suhu udara, serta tingginya frekuensi kekeringan dan banjir menyebabkan pergeseran pola tanam serta menurunnya produktivitas lahan. Dalam kondisi ini, pertanian cerdas iklim atau *Climate Smart Agriculture* (CSA) menjadi pendekatan strategis untuk menjawab tantangan ketahanan pangan masa depan.

Salah satu teknologi yang menonjol dalam CSA dan kini disebut sebagai "jurus sakti" pertanian masa kini adalah biochar. Teknologi ini bukan sekadar tren, melainkan solusi konkret berbasis ilmiah dan terbukti efektif di lapangan. Biochar adalah bahan berkarbon hasil pirolisis biomassa seperti limbah pertanian dan kayu dalam kondisi tanpa oksigen, yang kemudian dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan, dan bahkan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Biochar terbukti memiliki berbagai keunggulan dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap pertanian. Dari peningkatan ketersediaan air di tanah, efisiensi pemupukan, hingga peningkatan hasil panen, biochar menunjukkan performa unggul. Dalam uji coba



lapangan oleh program Genta Organik tahun 2023, biochar berhasil meningkatkan hasil panen padi rata-rata sebesar 12% atau sekitar 0,88 ton per hektare dibanding metode konvensional.

Tak hanya itu, biochar juga membantu menurunkan kepadatan tanah, meningkatkan porositas, dan memperbaiki kondisi biologis tanah melalui pertumbuhan mikroorganisme bermanfaat. Ini menjadikan biochar sebagai teknologi yang mampu menjaga produktivitas pertanian di tengah cuaca ekstrem dan penurunan kualitas tanah yang makin umum terjadi.

Lebih dari sekadar bahan pengolah tanah, biochar kini juga diakui sebagai instrumen penting dalam perdagangan karbon dunia. Satu ton biochar dapat menyimpan sekitar dua ton CO₂ ekuivalen. Dengan demikian, biochar memiliki nilai ekonomi baru dalam skema kredit karbon atau carbon removal, yang saat ini mulai menjadi fokus berbagai negara dalam menekan laju perubahan iklim.

Untuk bisa dijual sebagai kredit karbon, biochar harus

diproduksi menggunakan teknologi pirolisis yang memenuhi standar internasional. Setelah itu, biochar dapat didaftarkan ke lembaga seperti Verra, Puro atau Isometric.

Jika memenuhi syarat, produsen biochar bisa menjualnya di pasar sukarela seperti Carbon Future atau melalui reseller seperti South Pole dan bahkan perusahaan besar seperti Microsoft. Ini membuka peluang besar bagi petani atau pelaku usaha kecil untuk ikut serta dalam ekonomi hijau global.

Strategi Aplikasi Biochar

Penerapan biochar sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan jenis tanaman. Untuk tanaman padi dan bawang merah, biochar dapat disebar langsung ke lahan. Pada jagung dan cabai, diterapkan dengan cara larikan. Sementara untuk tanaman tahunan seperti jeruk, kakao, atau mangga, biochar dapat dimasukkan ke dalam lubang tanam.

Lebih lanjut, efektivitas biochar akan semakin maksimal jika dikombinasikan dengan teknologi CSA lainnya. Seperti penggunaan pupuk organik, benih unggul,

sistem tanam jajar legowo, hingga pengendalian hama terpadu menggunakan biopestisida. Sinergi teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi input produksi sekaligus menjaga lingkungan pertanian tetap lestari.

Tantangan

Meski potensinya besar, pengembangan biochar di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan pengetahuan petani, akses terhadap teknologi pirolisis, dan infrastruktur distribusi yang masih terbatas. Selain itu, kebijakan pendukung untuk mendorong industri biochar juga masih minim.

Untuk itu, dibutuhkan upaya sistematis dari pemerintah dan pemangku kepentingan melalui sosialisasi, pelatihan, serta pembangunan demplot di berbagai daerah. Peran penyuluh pertanian sangat vital dalam memperkenalkan biochar secara langsung kepada petani melalui kegiatan yang terintegrasi dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Pertanian (RKTP).

Biochar layak disebut sebagai jurus sakti pertanian cerdas iklim. Teknologi ini tidak hanya menawarkan solusi jangka pendek untuk meningkatkan produksi, tetapi juga kontribusi nyata dalam menyelamatkan lingkungan dan menghadapi krisis iklim global.

Mendorong penggunaan biochar secara luas bisa menjadi langkah strategis menuju swasembada pangan yang berkelanjutan. Apalagi bila dikaitkan dengan peluang ekonomi baru dalam perdagangan karbon. Pertanian Indonesia pun akan lebih tangguh, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi dinamika iklim masa depan.

Sudah saatnya biochar tidak hanya dikenal sebagai bahan pembenah tanah, tetapi juga sebagai simbol transformasi hijau pertanian Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Penulis : Sri Mulyani,
Penyuluh Pusat Penyuluhan
BPPSDMP

Ancaman Ekosistem Tambang Nikel di Raja Ampat

Aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat kembali menjadi sorotan tajam. Sedimen tambang nikel bisa menjadi ancaman nyata. Bahkan material dari daratan berpotensi menutupi terumbu karang Raja Ampat dan merusak ekosistem pesisir yang jadi surga biota laut.

Setelah Presiden Prabowo mencabut empat izin tambang di wilayah tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan kekhawatiran serius soal dampak ekologis yang bisa ditimbulkan dari operasi pertambangan, khususnya sedimentasi yang berpotensi menutup terumbu karang dan merusak ekosistem laut tropis paling kaya di dunia itu.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris menjelaskan, KKP telah menerjunkan tim gabungan dari Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) ke lokasi tambang di Raja Ampat. Tim ini bertugas melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), sekaligus memantau langsung potensi dampak terhadap kawasan pesisir dan laut.

"Terkait pengawasan, kami sudah kirim tim PSDKP dan Ditjen PK untuk menilai dampaknya. Tapi perlu waktu, karena dampak besar seperti sedimentasi baru terlihat saat musim hujan datang," ujar Aris. Sedimentasi menurutnya, merupakan salah satu bahaya paling nyata dari kegiatan tambang di pulau-pulau kecil. Material tambang yang terbawa hujan dapat mengalir ke laut, menutupi terumbu karang, lamun, dan habitat pesisir lainnya.

Jika proses ini terjadi berulang, maka kerusakan jangka panjang terhadap fungsi ekologis kawasan laut tak terhindarkan. "Sedimen itu bisa mengubur terumbu karang yang jadi tempat memijah ikan dan aktivitas wisata bahari. Lama-lama bisa mematikan ekosistemnya," katanya.

Selain dampak ekologis, Aris menyinggung soal legalitas tambang yang beroperasi di lima pulau kecil yakni Gag, Kawei, Batang Pele, Manyafun, dan Manuran. Seluruh pulau tersebut tergolong "pulau sangat kecil" berdasarkan klasifikasi UNCLOS, dengan luas di bawah 10 ribu ha yang idealnya tidak untuk

aktivitas industri berskala besar seperti pertambangan.

Pulau sekecil itu tidak cocok ditambang. Dalam UU No. 27 Tahun 2007, sudah sangat jelas tambang dilarang jika menimbulkan kerusakan atau dampak sosial. Namun kenyataannya, aturan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Salah satu tantangan terbesar adalah tumpang tindih kewenangan antarinstansi.

Banyak tambang yang berdiri di kawasan hutan, yang izinnya berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara KKP hanya memiliki kewenangan terbatas di area penggunaan lain (APL). Untuk itu, KKP akan segera meninjau ulang regulasi terkait tambang di pulau kecil.

Tujuannya, menciptakan harmonisasi antar kementerian agar tidak ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha tambang. KKP akan review semua aturan yang berkaitan dengan pulau kecil, supaya jelas batas dan kewenangannya. "Jangan sampai pulau kecil jadi korban eksploitasi," kata Aris.

Gsh/Yul



AgriNews

MUNAS HKTI, MOMENTUM KONSOLIDASI PETANI



H. Fadli Zon
KETUA UMUM HKTI

H. Prabowo Subianto
KETUA DEWAN PEMBINA HKTI

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-10. Kegiatan ini akan menjadi ajang penting untuk konsolidasi para petani dari seluruh Indonesia, serta melibatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Seper ti diketahui, sejak resmi didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta, HKTI telah menjadi pemersatu dari 14 organisasi petani yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Bahkan organisasi petani tersebut telah menempuh perjalanan panjang dengan berbagai dinamika.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Fadli Zon menganggap Munas X HKTI menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen organisasi dalam mendukung swasembada pangan nasional. "Insya Allah, Munas X HKTI akan dibuka langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ini adalah wujud nyata dukungan HKTI terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan," ujarnya.

Sebagai organisasi yang telah berdiri selama 52 tahun, HKTI memiliki pengalaman panjang dalam menaungi jutaan petani di seluruh nusantara. Bahkan Fadli menegaskan, HKTI juga turut berperan saat Indonesia pertama kali mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. "Kita optimistis, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, cita-cita swasembada pangan akan semakin kuat dan berkelanjutan," katanya.

Selain forum utama Munas, rangkaian kegiatan juga akan mencakup Ramah Tamah, Kongres Tani, Tani Fest, serta *Business Matching*. Seluruh acara ini dirancang untuk mempererat kerja sama lintas sektor dalam pengembangan pertanian Indonesia.

Sementara itu Wakil Ketua

Umum DPN HKTI, Mulyono Machmur menegaskan, swasembada pangan tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga harus berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Karena itu, melalui Tani Fest dan Business Matching, diharapkan dapat membuka akses petani kepada dunia usaha, koperasi, serta jejaring pasar, termasuk pasar internasional. "Swasembada pangan harus menjadi gerakan bersama," ujarnya.

Munas X HKTI ditargetkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk mendukung pencapaian target produksi pangan nasional serta membangun strategi implementatif menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.

Mitra Strategis Pemerintah

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan, pentingnya peran HKTI sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak petani dan mendorong kemajuan pertanian nasional. Bahkan HKTI harus menjadi mitra strategis pemerintah yang tak hanya hadir dalam kebijakan, tapi juga aktif dalam eksekusi program pertanian.

"HKTI adalah wadah para petani yang sudah berdiri sejak 1973. Ini bukan sekadar organisasi, tapi representasi suara petani di seluruh Indonesia. Karena itu, HKTI harus terus relevan, adaptif, dan menjadi penggerak utama dalam pembangunan pertanian nasional," kata Sudaryono.

Sebagai asosiasi petani, HKTI memiliki peran strategis yang tak tergantikan. Bukan hanya menyuarakan aspirasi petani, tapi juga menjadi jembatan antara

kebutuhan lapangan dan kebijakan pemerintah. HKTI juga bisa mengambil peran sebagai lembaga riset dan pengembangan (litbang).

Untuk itu, Mas Dar sapaan akrab Wamentan, HKTI harus mampu memberi solusi konkret, bukan hanya keluhan. Misalnya, menyediakan akses bibit unggul, pestisida organik, atau pelatihan membuat pupuk sendiri. Dengan begitu, biaya produksi bisa ditekan, dan pendapatan petani meningkat.

"HKTI harus memperkuat kapasitas kelembagaannya agar bisa memberikan layanan nyata kepada para petani. Kita butuh organisasi yang tak hanya punya massa, tapi juga punya kapasitas intelektual dan teknis. Ini soal masa depan pangan Indonesia," tegas Sudaryono.

Sudaryono berharap Munas HKTI bisa menjadi momentum pemersatu. "Harapan saya, Munas nanti bisa menyatukan kembali semangat para pendiri HKTI tahun 1973. Sudah saatnya kita kembali fokus untuk mendukung kaum tani," ucapnya.

Lebih jauh, ia mengibaratkan kolaborasi antara pemerintah dan HKTI sebagai dua kaki yang harus melangkah bersamaan. Tanpa harmoni antara keduanya, transformasi pertanian akan sulit tercapai. Jika Kementerian Pertanian itu kaki kanan, maka kaki kiri itu HKTI.

"Tapi kalau bisa, kakinya ditambah. Ada dari Perdagangan, Perindustrian, dan lembaga-lembaga lain. Dengan semakin banyak kaki, langkah akan lebih cepat, bantuan lebih merata, dan transformasi bisa lebih terasa," katanya.

Sudaryono mengakui, tak mungkin pemerintah berjalan sendiri tanpa sokongan organisasi seperti HKTI. Begitu juga sebaliknya, HKTI tidak bisa menanggung beban petani tanpa dukungan kebijakan

dan anggaran dari pemerintah. "HKTI tidak boleh jalan sendiri. Ini pekerjaan besar, harus ada sinergi. Negara punya kebijakan dan anggaran, HKTI punya jaringan dan akses ke petani. Keduanya harus bersatu," ujarnya.

Menurut Sudaryono, strategi utama meningkatkan kesejahteraan petani adalah dengan meningkatkan produktivitas pertanian. "Petani harus bisa tanam lebih banyak dan panen lebih sering. Dulu satu kali setahun, ke depan harus dua kali, bahkan tiga kali. Ini yang akan meningkatkan pendapatan mereka," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagian besar penduduk miskin di Indonesia adalah petani. Karena itu, peningkatan kesejahteraan petani harus menjadi fokus bersama. "Banyak petani masih masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Ini ironi. Karena mereka yang memberi makan kita semua justru yang paling rentan. Maka solusinya adalah meningkatkan kesejahteraan," tuturnya.

Sudaryono juga berharap, HKTI berperan dalam membantu petani dari hulu sampai hilir. Di hulu, HKTI bisa mendapatkan akses informasi, ilmu pertanian modern, dan teknik bercocok tanam yang lebih efektif. "Kita ingin petani tidak hanya bisa menanam lebih banyak, tapi juga lebih cerdas dan efisien. HKTI harus jadi corong edukasi itu," katanya.

Sedangkan di hilir, HKTI dapat membantu menjaga stabilitas harga hasil panen. Saat petani panen, HKTI bisa menyambungkan ke Bulog atau koperasi. "Jangan sampai harga jatuh, petani rugi. Kita perlu sistem yang melindungi mereka," ujarnya. Karena itu, ke depan Sudaryono mengajak semua pihak mulai bertindak dan bergerak bersama untuk mencapai swasembada pangan dan menggapai kesejahteraan petani. **Herman/Yul**

Petani Bersatu, Pertanian pun Bangkit



Indonesia menyaksikan babak baru dalam sejarah perjuangan petani. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), sebagai organisasi petani tertua dan terbesar di tanah air, resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (24/6).

Mengusung tema "HKTI Mewujudkan Pertanian Modern dan Struktur Perdesaan Maju," Munas ini menjadi momentum emas bagi HKTI untuk memperkuat posisi, memperbaharui arah kebijakan, dan menyatukan kembali kekuatan petani Indonesia.

"Ini adalah momentum yang sangat baik bagi para petani dan juga organisasi petani di Indonesia, termasuk HKTI sebagai wadah organisasi petani yang paling tua," ujar Ketua Umum DPN HKTI Periode 2015-2025, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. Lebih lanjut, Fadli Zon menekankan, saat ini adalah waktu yang sangat baik bagi sektor pertanian karena adanya perhatian besar dari pemerintah. Ia menyebut, di bawah kepemimpinan presiden yang berpihak pada petani, berbagai kebijakan pro-petani telah diimplementasikan.

"Kita sekarang memiliki seorang Presiden yang mempunyai keberpihakan kepada petani dan sektor pertanian. Menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas dalam pembangunan," ujar Fadli.

Beberapa kebijakan baru belakangan ini mulai terasa nyata dampaknya di lapangan, terutama bagi para petani. Salah satunya yang paling disambut hangat adalah penghapusan utang petani bermasalah. Selama ini, beban

utang jadi tembok besar yang menghalangi akses mereka ke pembiayaan. Kini, pintu peluang itu mulai terbuka kembali.

Tak hanya itu, pemerintah juga menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, lonjakan cukup signifikan dari harga sebelumnya yang berkisar Rp5.000 hingga Rp5.500 per kilogram. Ini tentu jadi angin segar bagi petani padi yang selama ini kerap tercekik di tengah biaya produksi yang tak sebanding dengan harga jual.

Distribusi pupuk subsidi pun ikut dibenahi. Penyalurannya kini lebih akurat: tepat sasaran, tepat harga, dan tepat jumlah. Artinya, petani yang benar-benar membutuhkan tidak lagi harus gigit jari karena kehabisan stok atau permainan harga di lapangan.

Satu lagi yang tak kalah penting yakni program makan bergizi gratis di sekolah. Di balik manfaat besarnya bagi anak-anak, program ini juga membuka peluang pasar baru bagi petani lokal. "Mereka bisa ikut memasok bahan pangan segar dan berkualitas, dari sawah dan kebun langsung ke piring-piring kecil di sekolah," ujarnya.

Menurut data BPS (2024), jumlah rumah tangga petani di Indonesia mencapai 27,3 juta. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari akses pasar, keterbatasan teknologi, hingga rendahnya regenerasi petani muda. HKTI ingin mengambil peran sebagai mitra

pemerintah dalam menjawab tantangan ini.

Indonesia Negara Kaya

Sementara itu Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy mengatakan, Indonesia mempunyai potensi kekayaan pertanian yang sangat besar. Sejarah membuktikan penjajah datang ke Nusantara karena ingin mengambil harta yang terpendam yakni komoditas perkebunan, khususnya rempah.

"Bisakah ini kita bangkitkan kembali. Saya yakin bisa, dengan semangat rekan-rekan HKTI sekarang ini," katanya. Bagaimana untuk bankit? Rachmat mengatakan, salah satu kuncinya adalah lembaga penelitian pertanian dihidupkan kembali. "Apa yang harus kita teliti dan bagaimana kita harus meneliti, supaya Indonesia bangkit kembali," tegasnya.

Saat ini Rachmat mengakui, tantangan pembangunan pertanian cukup besar. Selain konflik di luar negeri, salah satu persoalan yang paling sulit diatasi adalah perubahan iklim yang menyebabkan global warming dan kenaikan suhu. "Tampaknya kenaikan suhu ini sederhana, tetapi setiap kenaikan suhu 1 derajat akan menaikkan muka air laut. Artinya sebagian lahan-lahan kita di pantai-pantai di pesisir akan tenggelam," ujarnya.

Dari hasil penelitian, Rachmat mengungkapkan, setiap kenaikan satu derajat akan mengurangi produksi dan produktivitas berbagai tanaman. Bukan hanya itu, kenaikan suhu muka bumi akan menimbulkan penyakit baru. "Karena itu, ke depan kita harus menyiapkan tanaman yang tahan panas atau perubahan iklim," tegasnya. Karena itu, dirinya mendukung upaya menarik kembali lembaga penelitian pertanian ke Kementerian Pertanian.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong HKTI tak sekadar jadi penonton tapi pemain utama dalam hilirisasi komoditas strategis demi wujudkan pertanian maju dan berdaya saing tinggi. Dirinya mengajak seluruh anggota HKTI terlibat aktif dalam hilirisasi komoditas pertanian strategis, sebagai langkah konkret mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka lapangan kerja secara masif.

Dalam forum yang dihadiri oleh ratusan pengurus dan anggota HKTI dari seluruh Indonesia itu, Amran menegaskan, hilirisasi bukan sekadar jargon, melainkan peluang nyata untuk meningkatkan taraf hidup petani Indonesia. "Kalau petani hanya berhenti di lahan, dia hanya dapat sepersekian dari nilai total produk. Tapi kalau petani masuk ke hilir, ikut mengolah, ikut ekspor, petani akan jadi penguasa rantai pasok. Disitulah HKTI harus berdiri di depan," tegas Amran.

Data yang disampaikan menunjukkan bahwa hilirisasi dapat menjadi pengungkit utama perekonomian nasional. Sebagai contoh, komoditas kopi dengan luasan pengembangan 200.000 ha dan produk olahan arabica green bean membutuhkan investasi sebesar Rp24,74 triliun. Namun, keuntungan kumulatif yang bisa diperoleh mencapai Rp2.593,48 triliun dengan serapan tenaga kerja hingga 553.346 orang.

Sementara kelapa sawit, yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia, tercatat menyimpan potensi luar biasa. Dengan investasi Rp107,56 triliun untuk produksi biodiesel, sektor ini diproyeksikan memberi keuntungan kumulatif Rp1.288,69 triliun dan menyerap hampir 2 juta tenaga kerja (1.947.339 orang). "Ini menjadikannya sebagai komoditas dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi," katanya.

Selain mendorong hilirisasi, Mentan juga mendorong peningkatan produksi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. "Substitusi impor itu bukan soal nasionalisme semata, tapi soal peluang ekonomi dan efisiensi devisa negara. Petani kita harus siap naik kelas. HKTI harus jadi motor perubahan," tegasnya.

Gsh/Yul

HKTI, Wadah Perjuangan dan Pemersatu Petani



HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) telah menempuh perjalanan panjang lebih dari setengah abad. Berdiri sejak 1973, organisasi ini telah menjadi bagian dalam pembangunan pertanian, termasuk memperjuangkan petani Indonesia.

HKTI merupakan organisasi sosial berskala nasional di Indonesia yang berdiri secara independen dan mandiri. Organisasi ini tumbuh dan berkembang atas dasar kesamaan aktivitas, profesi, serta peran dalam bidang agrikultur dan pembangunan pedesaan. Dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme, HKTI hadir sebagai wadah yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan antarpetani di seluruh penjuru negeri.

Sejak resmi didirikan pada tanggal 27 April 1973 di Jakarta, HKTI telah menjadi pemersatu dari 14 organisasi petani yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Pembentukan HKTI sendiri tak lepas dari latar belakang sejarah panjang dinamika organisasi petani di Indonesia.

Pada tahun 1968, tercatat setidaknya ada 15 organisasi petani yang aktif, seperti PETANI, PERTANU, PETISI, GTI, dan SAKTI. Melihat kondisi yang terfragmentasi tersebut, pemerintah kala itu mendorong terbentuknya Badan Kerja Sama Tani (BKS-Tani) sebagai upaya awal untuk menyatukan kekuatan organisasi petani. Dari sinilah benih-benih pembentukan HKTI mulai tumbuh.

Namun, proses integrasi ini tidak berjalan mulus. Beberapa organisasi menyambut baik upaya peleburan ini, namun tidak sedikit pula yang menolak. Salah satunya adalah Sarekat Tani Islam Indonesia (STII), yang menilai pembentukan organisasi tunggal terasa dipaksakan dan tidak melewati mekanisme musyawarah nasional dari masing-masing organisasi.

Meski demikian, mayoritas organisasi petani akhirnya sepakat untuk meleburkan diri ke dalam satu wadah besar bernama HKTI, demi memperkuat efektivitas perjuangan petani secara nasional. Dengan semangat kolektif dan rasa tanggung jawab yang tinggi, HKTI lahir dari keinginan luhur untuk menyatukan

suara serta langkah perjuangan kaum tani Indonesia.

Angkat Harkat Martabat Petani

Tujuannya tak lain adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat petani, memperkuat posisi sektor agribisnis, serta menjadikan pertanian sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Untuk itulah HKTI hadir sebagai organisasi yang memiliki beragam fungsi penting dalam memperkuat sektor pertanian

dan memperjuangkan kepentingan petani.

HKTI menjadi wadah penghimpun potensi petani Indonesia, menjadi rumah besar bagi seluruh jenis "rukun tani" dan komoditas usaha tani yang tersebar di pelosok negeri. Selain itu, HKTI berperan sebagai alat penggerak dan pengarah perjuangan petani, tampil sebagai garda depan dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan petani melalui advokasi dan kebijakan publik.

Tak hanya itu, HKTI juga menjadi sarana penyalur amanat penderitaan rakyat tani dengan menyuarakan berbagai tantangan, hambatan, dan kebutuhan petani kepada pemerintah serta masyarakat luas. Dalam perannya sebagai wahana pendidikan dan pemberdayaan, HKTI terus mendorong lahirnya petani-petani yang mandiri dan berdaya

melalui pelatihan serta penguatan kapasitas.

HKTI juga mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan pertanian. Kehadiran Wanita Tani HKTI sebagai organisasi otonom berfungsi sebagai wadah perjuangan perempuan petani yang memiliki kedekatan historis dan ideologis dengan HKTI. Mereka memiliki peran strategis dalam menyalurkan aspirasi, meningkatkan kapasitas perempuan di desa, dan menjawab tantangan gender dalam pertanian.

Semua peran tersebut bermuara pada satu tujuan besar yaitu menjadikan HKTI sebagai arena untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni terciptanya keadilan sosial dan kemakmuran bersama melalui penguatan sektor pertanian dan kesejahteraan petani. **Dikutip dari berbagai sumber/Gsh/Yul**

PERJALANAN KEPEMIMPINAN HKTI

Dalam rentang waktu lebih dari tiga dekade, HKTI telah mengalami beberapa pergantian kepemimpinan yang membawa dinamika tersendiri bagi organisasi ini.

1. Kepemimpinan Martono (1973–1992)

Martono merupakan Ketua Umum pertama HKTI yang memimpin sejak berdirinya organisasi hingga tahun 1992. Ia dipilih secara resmi pada Munas I HKTI tahun 1989. Pada masa kepemimpinannya, fokus utama adalah melakukan konsolidasi struktural secara vertikal dan horizontal, karena HKTI bukanlah federasi melainkan hasil peleburan ormas-ormas tani yang telah ada sebelumnya. Konsolidasi ini diperlukan agar organisasi mampu bergerak solid sebagai kekuatan tunggal petani Indonesia.

2. Kepemimpinan H.M. Ismail (1993–1999)

Setelah wafatnya Martono pada 11 Desember 1992, HKTI menggelar Munas IV dan memilih H.M. Ismail sebagai Ketua Umum. Masa kepemimpinannya sering disebut sebagai masa "lesu darah" karena aktivitas organisasi tidak terlalu aktif. Meski HKTI menerima dana bantuan dari kerja sama dengan KAS, pemanfaatan dana ini tidak optimal, bahkan sebagian besar hanya digunakan untuk perjalanan luar negeri sebanyak 18 kali tanpa hasil yang signifikan bagi petani.

3. Kepemimpinan Siswono Yudo Husodo (1999–2004)

Munas V pada Februari 1999 menjadi titik balik bagi HKTI. Siswono Yudo Husodo terpilih sebagai Ketua Umum dan membawa angin segar bagi organisasi. Dalam masa kepemimpinannya, HKTI menggeliat

kembali melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan petani. Program-program tersebut mencakup penguatan sertifikasi tanah, pengembangan agribisnis, keuangan mikro, advokasi, dan peningkatan kedisiplinan organisasi. HKTI mulai dikenal kembali sebagai kekuatan tani yang aktif dan strategis.

4. Kepemimpinan Prabowo Subianto (2004–2009)

Prabowo Subianto dipilih melalui Munas VI yang berlangsung setelah pemilihan presiden tahun 2004. Semasa kepemimpinan Prabowo berbagai audiensi dan penandatanganan MoU telah dilakukan untuk memberdayakan petani.

5. Kepemimpinan Fadli Zon (2010–sekarang)

Pasca kepemimpinan Prabowo, Fadli Zon menjadi penerus sebagai Ketua Umum HKTI melalui Munas VII yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2010. Ia terpilih secara aklamasi menggantikan Prabowo Subianto. Dalam pidato usai terpilih, Fadli menekankan pentingnya menjadikan HKTI sebagai organisasi yang benar-benar menjadi corong dan pembela petani Indonesia, serta mengembalikan kejayaan sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi nasional.

Pada Musyawarah Nasional ke-8 yang digelar pada tahun 2020, Fadli Zon kembali terpilih menjadi Ketua Umum HKTI. Dalam masa kepemimpinannya, ia menegaskan komitmen untuk memperjuangkan kedaulatan pangan dan mendorong pertanian berbasis teknologi serta mendukung regenerasi petani muda. **Gsh/Yul**

Sosok Sudaryono, Anak Petani Calon Ketum HKTI

HKTI telah menempuh perjalanan panjang selama 50 tahun lebih dalam mendampingi petani. Selama itu, setidaknya 5 tokoh telah memimpin organisasi yang lahir pada 27 April 1973. Salah satunya Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto.

Pada 24-26 Juni 2025, HKTI akan menggelar Musyawarah Nasional X. Saat itu akan berlangsung pemilihan Ketua Umum yang selama dua periode sebelumnya dipimpin Fadli Zon. Pertanyaannya, siapa calon Ketua Umum HKTI periode selanjutnya?

Salah satunya yang digadag-gadang adalah Sudaryono. Dikancah perpolitikan Indonesia, Mas Dar sapaan akrabnya memang terbilang baru mencuat. Ketua Partai Gerinda wilayah Jawa Tengah ini sempat akan mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Tengah saat Pilkada 2024 lalu.

Namun sebelum pagelaran Pilkada serentak, Sudaryono keburu ditarik Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi mendampingi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman yang kembali dipilih menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Jika menengok latar belakang Sudaryono, khususnya yang berkaitan dengan pertanian, dirinya memang tak asing dengan dunia yang terkesan bau lumpur tersebut. Mas Dar lahir di dusun kecil, Dukuh Mangunrejo, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985.

Sejak kecil, Mas Dar sudah akrab dengan kerasnya hidup di desa dan dunia pertanian. Ia membantu orang tuanya yang menyewa lahan pertanian dan menjadi buruh bangunan musiman. Setiap hari, memanggul dua ember air dari sumur desa ke rumah, menempuh jarak hampir satu kilometer karena kelangkaan air bersih.

Ia juga mengangkut jerami dari sawah untuk pakan sapi ternak. Dalam situasi yang serba terbatas itu, Mas Dar tumbuh sebagai anak yang ceria, disiplin, dan penuh semangat. Kecerdasannya sudah tampak sejak usia dini. Di sekolah dasar, nilai rapornya selalu di atas delapan. Rahasiannya, belajar selepas subuh sebelum sekolah dimulai. Jadi apa yang diajarkan guru adalah pengulangan.

Lulus dari SD, Mas Dar melanjutkan ke SMP Negeri 2 Toroh, sekolah favorit di wilayahnya. Di sana, ia tetap menunjukkan prestasi gemilang. Ketekunan dan prestasinya membawanya lolos seleksi masuk SMA Taruna Nusantara lewat jalur beasiswa. Dari puluhan peserta seleksi, hanya empat yang lolos, termasuk Mas Dar. Di sekolah asrama bergengsi ini, ia digembleng dalam kedisiplinan dan solidaritas tinggi.

Saat menjalani pendidikan di Taruna Nusantara, Mas Dar sempat merasa minder karena satu-satunya anak miskin dari dusun. Sedangkan teman-temannya adalah anak-anak pejabat dan jenderal. Tapi semangat senasib-sepenanggungan di sekolah itu membangkitkan kembali kepercayaan dirinya.

Lulus sebagai siswa terbaik dari Taruna Nusantara, Mas Dar melanjutkan pendidikan ke National Defense Academy of Japan melalui beasiswa. Belajar di Negara maju menjadi kesempatan baginya menyerap etos kerja keras dan disiplin tinggi masyarakat Jepang, serta menyaksikan kemajuan pertanian berbasis teknologi.

Setelah itu, ia meneruskan pendidikan ke Jerman untuk program Magister Manajemen dan menyelesaikan studi doktoral di IPB University. Semua ini dilakukannya dengan satu tekad mengabdikan untuk pertanian dan petani Indonesia.

Perjalanan Karier

Lahir dari keluarga sederhana, Mas Dar tumbuh menjadi pribadi tangguh yang tak melupakan asal usulnya. Sosok pemimpin muda yang meniti karier dari dunia profesional, organisasi sosial, hingga politik nasional dengan satu benang merah: keberpihakan pada rakyat kecil.

Karier profesional dimulai pada 2014 sebagai Corporate Secretary di Nusantara Energy, lalu menjabat CEO Garuda TV pada 2018. Kiprahnya tidak berhenti di dunia media. Ia juga menjabat CEO PT Nusantara Telematics System sejak 2019 dan Chairman PT Sahabat Sejahtera

Farma sejak 2020.

Meski sukses secara profesional, hatinya tetap tertambat pada perjuangan rakyat kecil. Sejak 2021, Mas Dar memimpin organisasi besar seperti APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) dan Papera (Pedagang Pejuang Indonesia Raya). Lewat kedua organisasi ini, ia membantu lebih dari 36 ribu pedagang di seluruh Indonesia yang terjerat utang rentenir, dengan skema bantuan modal tanpa bunga melalui konsep "Warung Juang". Di Jawa Tengah saja, lebih dari 7 ribu UMKM telah terbantu.

Gerakan kerakyatan lainnya termasuk Program Becak Listrik, yang sudah mendistribusikan lebih dari 500 unit becak listrik ke berbagai provinsi sebagai solusi ekonomi dan lingkungan. Bagi Mas Dar, membantu wong cilik bukan sekadar kewajiban, tapi bentuk ibadah yang tak perlu diumumkan, cukup diketahui dirinya, penerima bantuan, dan Tuhan.

Dalam dunia politik, memang banyak yang tidak mengetahuinya. Mas Dar ternyata telah lama berada di lingkaran Prabowo Subianto. Ia pernah menjadi asisten pribadi Prabowo, lalu menjabat sebagai Wasekjen Gerindra, hingga akhirnya dipercaya sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah.

Kini sebagai Wakil Menteri Pertanian, Mas Dar konsisten menunjukkan keberpihakan pada petani. Turun ke sawah, berdialog langsung dengan petani, menyederhanakan akses bantuan pupuk, serta mendorong modernisasi pertanian melalui teknologi murah dan tepat guna. Petani baginya, bukan objek, tapi subjek pembangunan.

Sejak kecil, Mas Dar sudah akrab dengan kerasnya hidup di desa dan dunia pertanian.

Mas Dar juga menilai, kebijakan pertanian yang baik bukan yang indah di atas kertas, tetapi yang terasa manfaatnya di ladang-ladang dan kebun-kebun petani kecil. Bahkan ia percaya, keadilan pangan hanya bisa terwujud jika petani hidup sejahtera. Itulah mengapa dirinya terus memperjuangkan anggaran pertanian yang berpihak pada petani kecil, bukan hanya untuk proyek besar yang seringkali tidak menyentuh akar permasalahan.

Kini, di usianya yang masih muda, Sudaryono membawa harapan besar bagi dunia pertanian Indonesia. Dengan pengalaman hidup sebagai anak petani, latar belakang pendidikan global, dan jiwa kepemimpinan yang kuat, ia menjelma menjadi sosok pemimpin yang dibutuhkan zaman. **Disarikan dari website pribadi Sudaryono/Gsh/Yul**



Intip Peluang jadi Penyalur Pupuk Bersubsidi

Tata Kelola distribusi pupuk kini memasuki paradigma baru. Beberapa persoalan yang menghambat mulai dipangkas. Kelompok petani pun bisa menjadi penyalur pupuk bersubsidi. Ini menjadi peluang baru. Siapa berminat?



Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Keduanya menjadi landasan hukum bagi transformasi besar dalam program pupuk bersubsidi nasional, termasuk perubahan skema penyaluran dan pelibatan lebih banyak pihak di tingkat lapangan. Salah satu ada margin fee yang bakal dinaikkan.

Sejak Tahun 2010

Direktur Pupuk, Ditjen

Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Jekvy Hendra mengatakan, selama ini margin fee distributor dan pengecer belum berubah sejak 2010. Untuk distributor Rp 50/kg dan pengecer Rp 75/kg. "Kajian dilakukan Pusat Sosial Ekonomi Pertanian, Kementerian Pertanian. Tujuan kajian peningkatan margin/fee distributor dan pengecer," katanya.

Menurutnya, tujuan kajian ini untuk menganalisis struktur biaya dan pendapatan dari usaha distribusi dan eceran pupuk bersubsidi. Selain itu juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan pendapatan dari usaha distribusi dan eceran pupuk bersubsidi. "Wawancara dilakukan langsung kepada pengelola distributor dan kios di lokasi survei dan pembagian kuesioner online melalui Google Form," ujarnya.

Ada empat lokasi survei yakni Subang (Jawa Barat), Probolinggo (Jawa Timur), Langkat (Sumatera Utara) dan Takalar (Sulawesi Selatan). Kebijakan pemerintah menaikkan margin fee bagi pengecer pupuk bersubsidi menjadi peluang bisnis bagi kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang ingin menjadi penyalur pupuk bersubsidi.

Sebelumnya ketika pemerintah menetapkan titik serah pupuk bersubsidi ada pada gapoktan/poktan, banyak yang enggan menjadi penyalur. Alasannya, selain margin fee yang relatif kecil, resikonya juga sangat besar, karena kekhawatiran terjerat hukum.

Bagaimana dengan distributor? Jekvy mengatakan, merekantinya berada langsung di bawah Pupuk Indonesia yang menjadi penentu teknis di lapangan. Jadi Pupuk Indonesia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap entitas dalam distribusi pupuk sampai ke titik serah dan ketersediaan pupuk yang ada di setiap lokasi.

Sementara itu, Kepala Pokja Pupuk Bersubsidi, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sri Pujiastuti menjelaskan, kajian ini mempertimbangkan aspek kewajaran dan relevansinya terhadap Harga Pokok Penjualan (HPP) pupuk bersubsidi yang diatur dalam Permentan No 28 Tahun 2020.

"Kami reviu dan akan koordinasikan dengan Kementerian Keuangan karena ini menyangkut anggaran negara," ujar Sri. Namun Sri sedikit membocorkan kemungkinan margin fee naik signifikan, bahkan hingga dua kali lipat. "Kenaikannya bisa saja menjadi Rp 145-150 per kg. Tapi

tentu akan kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran," tambahnya.

Sebagai gambaran, kenaikan margin fee sebesar Rp 1 per kg saja bisa berdampak besar karena dikalikan dengan total alokasi pupuk bersubsidi 2025 yang mencapai 9,5 juta ton. Tak hanya soal angka, penyesuaian margin fee juga menyentuh aspek struktur penyaluran.

Sesuai regulasi terbaru, penyalur pupuk bersubsidi kini tak terbatas pada kios pengecer saja. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdakan), koperasi, hingga Koperasi Desa Merah Putih ikut dilibatkan sebagai titik serah. Insentif margin fee yang wajar dinilai penting agar seluruh pihak merasa adil dan semangat menjalankan tugas.

Distribusi Sehat

Ketua Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah IPB University, Faroby Falatehan menilai, penyesuaian margin fee sangat penting dalam menciptakan usaha distribusi yang sehat dan berintegritas. Bahkan diyakini dapat menghindari praktik tak terpuji akibat rendahnya keuntungan yang diterima penyalur.

Dalam praktik di lapangan, Faroby melihat, banyak biaya tak terlihat seperti pulsa untuk sistem digitalisasi atau operasional mesin penyalur. Biaya-biaya tersebut tidak pernah dihitung dalam margin fee selama ini. Karena itu, ia menghitung, idealnya margin fee berada di kisaran 15-20 persen dari harga barang. "Dengan margin fee yang layak, para penyalur bisa lebih profesional dan tidak merasa dirugikan," imbuhnya.

Namun demikian, Faroby juga menyoroti perlunya standarisasi penunjukan penyalur pupuk bersubsidi. Hal ini ia nilai penting untuk mencegah konflik antarpihak, menghindari mundurnya pengecer lama yang merasa tidak lagi menguntungkan, serta meminimalisir koreksi distribusi yang menjadi beban administrasi.

Meski sistem berubah dan margin fee disesuaikan, namun Faroby mengingatkan, pelayanan terhadap petani penerima manfaat harus tetap optimal. Baginya, penyesuaian margin fee ini hanyalah satu dari sekian langkah reformasi pupuk bersubsidi. **Gsh/Yul**

Tabel. Usulan Penyesuaian Margin Fee

No.	Uraian	Distributor (Rp/Kg)	Pengecer (Rp/Kg)	Potensi Kebutuhan Tambahan Anggaran (Rp)	% Terhadap DIPA Subsidi Pupuk
1	Usulan penyesuaian fee dari PIHC - Tahun 2021	83	135	888.150.000.000	2,01%
2	Hasil Reviu Itjen Kementan dan BPKP - Tahun 2022	79	117	678.050.000.000	1,54%
3	Usulan dari Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia (ADPI) - Tahun 2024	125 - 150	150	1.432.500.000.000	3,24%

Jadi Penyalur Pupuk Bersubsidi, Menakar Kesiapan Petani



Perubahan dalam tata kelola pupuk bersubsidi pasca terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 15 Tahun 2025 menjadi sorotan. Salah satu perubahan besar adalah dalam distribusi pupuk bersubsidi, petani menjadi lokasi titik serah dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Kelompok Tani (Poktan) bisa menjadi penyalur pupuk bersubsidi.

Kebijakan baru ini harus diantisipasi. Pasalnya, jika Gapoktan/Poktan belum siap, maka bisa menimbulkan disinsentif bagi pelaku usahanya di lapangan. Salah satu pokok perubahan yang diatur dalam Permentan adalah terbukanya titik serah subsidi tidak hanya di kios pupuk resmi, tetapi juga pada kelompok tani, gapoktan, hingga koperasi perikanan (pokdakan).

Meski bertujuan meningkatkan akses bagi petani dan pembudidaya, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran. Hal tersebut mencuat saat Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah (MMPD) Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University pada Selasa (17/6) bertajuk "Tantangan dan Peluang Kebijakan Subsidi Pupuk pada Sektor Pertanian Pasca Terbitnya Permentan 15 Tahun 2025."

Dalam forum tersebut, Ketua Senat FEM IPB University, Prof. Yusman Syaukat menyampaikan kekhawatiran serius mengenai kesiapan penyalur, terutama kios resmi, dalam menghadapi sistem distribusi baru yang membuka titik serah lebih luas. Baginya yang menjadi masalah utama bukan hanya soal niat kebijakannya, tapi kesiapan penyalur dan sistem pengawasan di lapangan.

"Jika penyalur merasa perannya tergeser tanpa diberi waktu dan pendampingan untuk beradaptasi, itu akan menimbulkan disinsentif," tegas Prof. Yusman. Karena itu, ia menyarankan, penambahan pelaku titik serah tersebut seharusnya diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengganti kios pupuk.

Karena minimnya sosialisasi dan kesiapan lapangan membuat banyak penyalur tradisional merasa terancam. "Ada rasa bahwa peran mereka sedang diambil alih. Padahal regulasinya tidak seperti itu. Tapi kalau informasi tidak sampai, persepsi itulah yang dominan. Inilah kenapa sosialisasi dan edukasi kebijakan itu menjadi sangat penting," ujarnya.

Berdasarkan uji kesiapan yang IPB lakukan terhadap Gapoktan di wilayah amatan hasilnya cukup mencengangkan. Prof. Dr. Faroby Falatehan, Ketua Prodi Magister Manajemen Pembangunan Daerah (MMPD) Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University mengungkapkan, sebanyak 79,6 persen dinyatakan tidak siap menjadi penyalur pupuk subsidi, dan hanya 20,4 persen dinilai siap. "Itu pun dengan pendampingan," ujarnya.

Faroby menilai, ketidaksiapan ini bukan hal sepele. Pasalnya, Gapoktan yang diuji rata-rata tidak memenuhi indikator dasar. Misalnya, permodalan, legalitas, manajemen administrasi, pengelolaan keuangan, distribusi pupuk, hingga sarana

teknologi informasi. "Jika kebijakan ini dipaksakan tanpa pembinaan serius, kita hanya akan mengganti aktor tetapi mewarisi masalah lama dalam distribusi pupuk. Bahkan bisa menambah keruwetan baru," katanya.

IPB juga mencermati keberadaan 26.576 koperasi yang kini masuk ke sektor pupuk. Sebagian besar diantaranya adalah koperasi yang baru berdiri, termasuk Koperasi Desa Merah Putih.

"Koperasi-koperasi ini masih membutuhkan sosialisasi regulasi, pelatihan mekanisme distribusi, serta penguatan sarana dan prasarana," katanya mengingatkan.

Tak hanya itu, IPB juga menyoroti potensi konflik antar penyalur pupuk bersubsidi akibat pembagian wilayah dan alokasi yang belum terstandarisasi. Penambahan pihak penyalur seperti Gapoktan, Pokdakan, dan koperasi bisa memicu mundurnya kios pengecer eksisting. "Alokasi yang biasanya mereka pegang, kini harus dibagi. Tanpa aturan main yang jelas, konflik horizontal tak terelakkan," ujarnya.

HET Masih Jadi Keluhan

Prof. Yusman juga menyoroti masalah klasik yang belum terselesaikan yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET). Banyak petani masih mengeluh membayar lebih mahal dari HET yang seharusnya berlaku di kios. HET pupuk bersubsidi itu sudah diatur. Misalnya, Urea Rp2.250/kg, NPK Rp2.300/kg, dan NPK lainnya

Rp2.500/kg. Tapi di lapangan, masih banyak kasus petani membayar jauh lebih tinggi. "Ada yang bilang HET-nya 150 persen," ujarnya.

Ironisnya, banyak dari praktik ini terjadi tanpa pemahaman yang benar dari petani maupun pihak kios. "Ketika ditanya, kenapa mahal? Dijawab, karena pupuk diantar ke rumah di daerah pegunungan. Padahal HET itu berlaku di titik kios. Kalau ada tambahan biaya, seharusnya transparan dan disepakati, bukan dibungkus seolah-olah HET-nya memang segitu," jelasnya.

Di sisi lain, Prof. Yusman juga mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian yang sejak beberapa tahun terakhir sudah menerapkan sistem digitalisasi penyaluran pupuk, termasuk integrasi dengan data Dukcapil untuk verifikasi penerima subsidi. Namun, menurutnya, sistem canggih tidak serta-merta menjamin akurasi dan keadilan distribusi.

"Sistemnya memang sudah digital, datanya sudah terhubung ke Dukcapil, proses verifikasi berlapis. Tapi kalau SDM di lapangan belum siap, sistem yang bagus bisa tetap gagal," katanya. Untuk itu, ia mengingatkan, proses padan data, pemutakhiran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), hingga pemahaman petani terhadap prosedur transaksi masih perlu diperkuat.

"Digitalisasi itu bukan sekadar aplikasi. Tapi juga soal akses, pemahaman, dan kesiapan para pelaku. Kalau petani bingung, kios kewalahan, penyuluh tak maksimal, maka sistem yang dimaksud justru menciptakan kebingungan baru," ujar dia.

Selain masalah data dan HET, Prof. Yusman menyoroti pentingnya keterbukaan informasi di level kios dan kelompok tani. Menurutnya, stiker harga pupuk dan informasi penerima subsidi harus ditampilkan secara jelas dan mudah diakses petani. "Petani harus tahu berapa harga resmi pupuk, siapa saja yang berhak, bagaimana prosedurnya. Kalau informasinya tertutup, ruang untuk manipulasi akan tetap terbuka," katanya.

Prof. Yusman juga meminta pemerintah tidak hanya fokus pada aspek regulasi, tapi juga harus memastikan kesiapan di semua lini, dari pusat hingga pelosok. Kebijakan tegasnya, harus disertai dengan kesiapan implementasi. "Jangan sampai semangat reformasi subsidi pupuk ini justru menyulitkan petani atau menyingkirkan kios yang sudah puluhan tahun melayani petani," ujarnya.

Dengan segala tantangan yang ada, IPB University berharap pemerintah lebih intensif melakukan evaluasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas penyalur. Sebab, kunci sukses kebijakan bukan di atas kertas, tapi pada kenyataan yang dihadapi petani dan penyalur setiap harinya. **Gsh/Yul**

Kiman Siregar

Membangun Bisnis Tak Melulu Soal Uang



Semangat memperjuangkan keseimbangan dan kesejahteraan bagi semua pihak diteguhkan oleh Kiman Siregar. Sosok ini tak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, ia juga mengabdikan keilmuannya sebagai dosen, menjadi penulis dan aktif di berbagai organisasi yang memiliki perhatian besar terhadap lingkungan dan energi terbarukan.

Spiritnya membangun ekonomi daerah dan kerakyatan juga menjadi bagian dari perjalanan peraih gelar Doktor di IPB University ini. Pria kelahiran Janjimauli, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara pada Mei 1978 ini juga memiliki jaringan luas di dunia bisnis dan berperan aktif dalam membantu start-up dan pengusaha muda untuk mengembangkan potensi mereka.

Kiman Siregar, sebagai pendiri Dakara Group juga dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan berpengalaman di industri teknologi. Dengan kombinasi pengalaman dan pengetahuan di bidang teknologi

serta kemampuan investasi, Dakara Group terus berkembang sebagai salah satu perusahaan yang berperan penting dalam ekosistem teknologi dan investasi.

Inspirasi Tiga Anak

Lulus dari SMA Negeri 1 Padangsidimpuan pada 1997, Kiman langsung melanjutkan kuliah ke IPB University melalui jalur USMI. Lulus dengan gelar Sarjana Teknik Pertanian pada tahun 2001. Pada tahun 2009, Kiman melanjutkan studi S3 di IPB University dan sebagian riset S3 di Universitas Tokyo di Jepang. Salah satu pembimbingnya Prof. Tetsuya Araki dari The University of Tokyo hingga akhirnya pada 2013 ia memperoleh gelar Doktor.

Menikahi Sholihati tahun 2005, Kiman kini dianugerahi tiga anak. Ketiga anaknya ini menjadi inspirasi baginya dalam membangun perusahaan Dakara Group dengan menggabungkan tiga suku kata nama anaknya. "Dakara merupakan gabungan dari tiga suku kata anak saya, yaitu Dzaky, Kaysa, dan Raja. Jadi Dakara bisa diartikan sebagai semangat dari tiga anak kami yang akhirnya diputuskan membuat Dakara Group dengan fokus bisnis pada tiga bidang, yakni pendidikan, bisnis UMKM IKM, dan lingkungan," ujar Kiman.

Fokus mengembangkan bisnis, Kiman mendirikan Dakara Bisnis Institute yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, pendidikan, consultan, konstruksi, energi, dan juga UMKM dan IKM. Dakara Bisnis Institute membawahi tujuh badan usaha yakni, Dakara Coffee, Dakara Consultan LCA Indonesia, Dakara Mart, Dakara Konstruksi Indonesia, Dakara Energi Alsintan Indonesia, dan TKIT BCM (Bina Cendikia Mandiri).

Salah satu alasan Kiman terjun membangun Dakara Coffee yang diluncurkan pada 2019, adalah karena dunia perkopian memiliki daya tarik dari hulu ke hilir. Banyak

kreasi yang bisa dilakukan setelah pasca panen kopi hingga sampai ke pada konsumen dalam bentuk turunannya yang beragam.

Dakara Coffee hadir dengan 18 kopi terbaik Indonesia, dengan pasca panen full wash, semi wash, honey, dan wine yang tergolong premium. Untuk penyajiannya, Kiman menghadirkan beberapa metode *chemex*, *french press*, *aeropress*, *V60*, *vietnam drip*, *syphon*, dan tubruk yang disesuaikan dengan selera konsumen.

Dalam sektor teknologi, Dakara Group terlibat dalam pengembangan dan investasi di berbagai perusahaan teknologi. Usahanya fokus pada sektor-sektor seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), teknologi finansial (*fintech*), dan teknologi kesehatan (*healthtech*). Perusahaan ini berinvestasi dalam perusahaan start-up yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang tinggi.

Dakara Group juga menyediakan layanan konsultasi untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional, pengembangan strategi bisnis, dan pengoptimalan teknologi. Tim ahli Dakara Group bekerja sama dengan klien mereka untuk memberikan solusi yang inovatif dan memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Bantu UMKM

Seperti dikutip dari alumniipdpedia.com, Kiman termasuk sosok yang memiliki semangat membangun UMKM dengan niat membantu pelaku usaha untuk bisa naik kelas dan mengembangkan bisnis mereka. Karena itu, ia mendirikan Dakara Mart, sebagai salah satu anak perusahaan yang membantu pemasaran produk UMKM.

Saat ini Dakara Mart sudah menampung sekitar 150-an produk UMKM dari seluruh Indonesia. Bahkan perusahaannya tersebut berhasil mendapatkan penghargaan melalui

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bidang UMKM, yang diserahkan langsung Pemda Kabupaten Sukabumi.

Di kampung halamannya Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Kiman bergerak membantu meningkatkan peluang bagi para pelaku UMKM. "Kuantitas bisnis UMKM kita cukup besar, sekitar 98 persen, tapi nilai bisnisnya dikalahkan pebisnis besar yang kuantitasnya hanya sekitar 2 persen. Kita harus membantu agar pelaku UMKM ini bisa naik kelas menjadi bisnis besar pula," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungannya, selain melalui Dakara Mart, ia juga memiliki peranan penting di berbagai lembaga atau organisasi, seperti Ketua Yayasan Festival Oleh-oleh Tabagsel (YFO2T), Sekretaris Jenderal di Perkumpulan Asuh UMKM IKM, dan pembeda di Yayasan Dakara Bisnis Institute.

Baginya, semua jejaring yang dibangun itu sebagai upaya untuk memperluas jejaring bisnis agar memberikan dampak kesejahteraan bagi semua pihak. "Modal bisnis ini bisa bersumber dari relasi, ide, kesehatan, dan tenaga. Jadi tidak melulu soal uang. Keliru jika mau menjalankan bisnis yang dipikirkan adalah soal uangnya. Apalagi jika harus meminjam uang ke orang tua, seharusnya ketika orang tua sudah menyekolahkan, maka kita harus gunakan ilmu yang didapat untuk bisa membangun bisnis," ujarnya.

Melalui berbagai perannya tersebut, Kiman bersama pelaku UMKM terus menyuarakan pentingnya bersinergi dan berkolaborasi. Bahkan kini Kiman tengah memperjuangkan pembangunan Koperasi Konsumen Syariah Ikatan Saudagar Muslim Indonesia – Bogor Raya (ISMI BORA) yang juga diketuai olehnya. Semangatnya mengangkat pelaku usaha UMKM menjadi contoh bahwa ketika sudah sukses jangan lupakan mereka yang masih di bawah. **Yul**



Buku Saku Penyuluh Pertanian dan Swasembada Pangan Indonesia

Penyuluh pertanian dan petani merupakan sumber daya manusia yang memegang peran sentral dalam pembangunan pertanian. Keduanya terlibat langsung dalam kegiatan usahatani yang dilakukan secara berkelanjutan di berbagai lahan pertanian. Kegiatan ini memiliki dampak signifikan dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan menjadi pilar penting dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan, tentunya dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Mengapa hal ini begitu penting? Karena peran aktif penyuluh pertanian dan petani sangat dibutuhkan untuk mencapai swasembada pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, diperlukan transformasi pengelolaan pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian modern. Strategi utama yang ditempuh saat ini adalah mengoptimalkan peran penyuluh pertanian sebagai motivator, fasilitator, formulator, dan konsultan agribisnis.

Salah satu titik penting dalam penguatan peran penyuluh pertanian adalah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian. Inpres ini menjadi tonggak penting dalam mendukung swasembada pangan Indonesia. Dengan adanya regulasi tersebut, penyuluh pertanian berada langsung di bawah komando Kementerian Pertanian dan memiliki peran strategis meskipun tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Keberadaan penyuluh pertanian telah ada sejak era Bimas, di mana

Oleh:
Ir. Sri Hartati, M.P..

Penyuluh Pertanian Utama BRMP Kementerian Pertanian

Kantor Wilayah Pertanian didirikan di setiap provinsi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pertanian. Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi utama seperti melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan nasional bidang pertanian di tingkat provinsi, memfasilitasi sinergi antar pihak yang terlibat dalam sektor pertanian, memberikan bimbingan teknis dan non-teknis kepada petani, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian.

Juga melakukan pengawasan dan pengendalian agar kegiatan sesuai dengan regulasi dan standar, memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat terkait pertanian, serta mendorong pengembangan pertanian melalui teknologi, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

Untuk mendukung tujuan swasembada pangan, penyuluh pertanian harus dibekali dengan berbagai inovasi teknologi dan informasi. Dalam konteks ini, kehadiran Buku Saku Penyuluh Pertanian menjadi sangat penting. Buku ini menjadi acuan dalam kegiatan penyuluhan, yang pada dasarnya adalah proses untuk mengubah perilaku, pengetahuan, dan keterampilan sasaran agar mau dan mampu mengelola usahatani yang produktif dan menguntungkan.

Buku saku ini juga menjadi alat penting untuk meningkatkan kapasitas penyuluh. Di dalamnya termuat informasi tentang program dan kegiatan yang mendukung pencapaian swasembada pangan, sebagaimana diharapkan oleh Menteri Pertanian dan Presiden melalui Kabinet Merah Putih.

Selain memuat program, buku ini juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, pedoman umum, dan petunjuk teknis yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang harus dilakukan penyuluh saat mendampingi petani di lapangan. Ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi program serta memudahkan pelaksanaan di lapangan.

Di sisi lain, keberadaan buku saku ini juga menguntungkan bagi instansi pertanian.

Program dan kegiatan dari Kementerian Pertanian menjadi lebih mudah disampaikan kepada pelaku utama, yaitu para petani, melalui peran jembatan dari

penyuluh pertanian. Penyuluh dapat dikatakan telah menjadi media reklame yang efektif dalam menyampaikan informasi program pertanian kepada petani di seluruh wilayah Indonesia.

Bukankah ini menjadi kekuatan besar dalam mendukung swasembada pangan nasional? Dengan penyuluh yang berada di garis terdepan dan dekat dengan petani, maka informasi strategis dan teknis bisa langsung diterapkan. Hal ini tentu akan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan, dengan jaminan hasil usahatani yang terserap oleh pasar dan lembaga seperti Bulog, dengan harga yang berpihak kepada petani.

Teruslah berkarya dan jalin kemitraan yang harmonis, pejuang pertanian (Penyuluh Pertanian dan Petani) mendukung tercapainya swasembada pangan Indonesia.



Asa Dipundak HKTI

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyelenggarakan Munas X. Kegiatan tersebut menjadi momen besar bagi organisasi petani yang lahir pada 27 April 1973. Sebagai organisasi petani yang cukup besar dan paling tua, telah memberikan banyak warna bagi pembangunan pertanian.

Di tengah tantangan pembangunan pertanian yang kian besar, ada satu harapan besar yang ditujukan kepada pengurus HKTI yang baru yakni menjadi garda terdepan memajukan petani dan pertanian.

Seperti diketahui, upaya peningkatan produksi pangan kian tak mudah, bukan hanya tantangan perubahan iklim yang kian sulit

diprediksi, tapi juga masalah klasik seperti konversi lahan pertanian yang semakin masif, pelandaian produksi pangan dan terus meningkatnya jumlah penduduk Indonesia.

Seperti diketahui, pemerintahan saat ini menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas strategis. Salah satunya menciptakan swasembada pangan di Indonesia. Namun diakui, untuk mencapai swasembada pangan menghadapi tantangan utama. Misalnya, jumlah penduduk Indonesia yang makin besar, saat ini sebanyak 280 juta jiwa. Jumlah itu yang harus diberikan makan. Dengan kerjasama stakeholder dan petani, cita-cita tersebut bisa terwujud.

Selama ini masalah pertanian klasik. Karena itu, pekerjaan rumah pemerintah adalah bagaimana bisa mengintegrasikan agar sektor

pertanian lebih efektif untuk mencapai swasembada pangan, ketahanan pangan dan kemandirian, bahkan kedaulatan pangan. Karena itu, intervensi pemerintah menjadi penting.

Namun demikian, HKTI yang didalamnya berada kontribusi tokoh-tokoh pertanian dapat memberikan pikiran dan ide agar kebijakan pertanian tepat agar intervensi pemerintah juga tepat. Bagaimana menjadikan kebijakan pangan terintegrasi hulu-hilir, *on farm* dan *off farm*. Ujung-ujungnya adalah bagaimana petani bisa hidup lebih sejahtera.

Data BPS menyebutkan pada September 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 24,06 juta orang atau turun sebanyak 1,16 juta orang dibandingkan Maret 2024. Kondisi kemiskinan terjadi di daerah

perkotaan maupun di pedesaan. Namun, disparitas kemiskinan antar wilayah perkotaan dan pedesaan masih lebar.

Pada September 2024, tingkat kemiskinan pedesaan sebesar 11,34% atau lebih tinggi dari tingkat kemiskinan perkotaan yang sebesar 6,66%. Dilihat dari lokasi kemiskinan terbesar berada di pedesaan. Padahal masyarakat yang tinggal di pedesaan umumnya bekerja sebagai petani. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah, namun juga menjadi harapan bagi HKTI sebagai organisasi petani terbesar di Indonesia.



Oleh: **Memed Gunawan**

Mengembalikan Kejayaan Swasembada Bawang Putih, Mungkinkah?

Pernah berjaya sebagai negara swasembada bawang putih di era 1990-an, Indonesia kini bersiap menggapai kembali. Dengan dukungan teknologi digital, inovasi pertanian presisi, dan petani yang tetap setia menanam di tengah tantangan membuat swasembada bukan hal yang mustahil.

Bagi petani di Tanah Air, budidaya bawang putih sebenarnya tak asing. Melihat history bawang putih nasional, sebetulnya tahun 1993-1996 produksi bawang putih Indonesia cukup

bagus. Bahkan mampu memenuhi hampir 85 persen kebutuhan nasional. Kemudian menurun sejak krisis moneter dan ada kesepakatan dengan IMF, sehingga akhirnya bawang putih impor banyak masuk ke Indonesia.



Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Andi Muhammad Idil Fitri menjelaskan, potensi Indonesia untuk kembali swasembada sangat besar. Ia menyebutkan bahwa lahan yang memiliki potensi untuk ditanami bawang putih mencapai 1,5 juta hektar (ha).

Saat ini ia mengakui, realisasi produksi masih sangat terbatas. Untuk itu, pembenahan sistem budidaya, penguatan benih, serta pengelolaan data spasial menjadi langkah yang tengah diupayakan. "Dengan pemanfaatan teknologi, penerapan budidaya yang benar kita ditantang untuk meningkatkan produktivitas hingga 20 ton/ha," ujarnya.

Hingga kini, sudah tercatat lebih dari 4.700 ha lahan yang tersebar di 11 kabupaten seperti Temanggung, Wonosobo, Kendal, Bima, dan Lombok Timur. Selain itu, kegiatan wajib tanam non-APBN pun mulai digencarkan. Saat ini lebih dari 1.000 ha lahan sedang dalam proses pengembangan, khususnya untuk musim tanam Mei-Juni 2025.

Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi berbagai pihak agar produktivitas pertanian dapat meningkat. Apalagi semangat petani dalam menanam bawang putih, menurut Andi, masih cukup tinggi meskipun penuh tantangan. "Pemerintah berencana memberikan apresiasi kepada kelompok tani atau petani yang berhasil menghasilkan produktivitas tertinggi," katanya.

Budidaya Bawang Putih

Sementara itu Prof. Sobir, Guru Besar IPB University sekaligus pakar bawang putih nasional, menyampaikan, secara umum produktivitas bawang putih Indonesia masih lebih tinggi dibanding negara-negara Asia lain seperti Filipina, Thailand, dan India. Namun, masih tertinggal dari China. "Di beberapa wilayah Indonesia, produktivitas bisa mencapai 23 hingga 26 ton/ha, seperti yang terjadi di Tegal," jelasnya.

Keberhasilan ini, lanjut Prof. Sobir, tidak lepas dari pengelolaan budidaya yang baik. Karena itu, petani harus memperhatikan cara budidaya yang baik. Tahapan awal seperti

pengolahan tanah harus dimulai dengan pengecekan pH yang ideal antara 5,5 - 7, kemudian dilakukan pengapuran menggunakan dolomit atau kapur sebanyak 2 ton/ha.

Dikatakan, tanah yang sudah digemburkan lalu dicampur dengan pupuk kandang sapi atau ayam. Selanjutnya, pupuk dasar seperti SP-36 ditambahkan 15 hari sebelum tanam. Pemilihan benih juga menjadi faktor penting. Ciri-ciri benih unggul yang sehat dan tidak keropos, berumur 6-8 bulan, serta memiliki ukuran siung besar akan memberikan hasil yang lebih optimal.

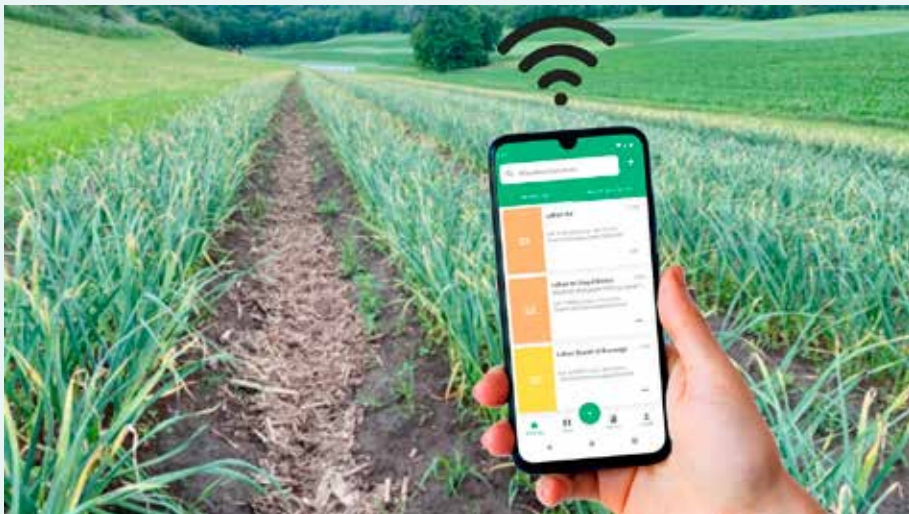
Sobir mengingatkan, sebelum tanam, benih perlu direndam dengan larutan PGPR agar tumbuh lebih baik. Setelah penanaman, perawatan dilakukan secara rutin. Penyulaman dilakukan untuk mengganti benih yang tidak tumbuh. Pada masa pertumbuhan awal, penyiraman dan pemupukan dilakukan sesuai fase, dengan jadwal pemupukan susulan sebanyak lima kali.

"Unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium sangat berpengaruh terhadap kualitas umbi. Kalsium, misalnya, terbukti membuat umbi lebih keras dan tahan simpan, bahkan dibandingkan dengan bawang putih impor yang kadar kalsiumnya lebih rendah," jelas Prof. Sobir.

Dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), Sobir mengatakan, harus dilakukan secara terpadu dengan prinsip ramah lingkungan. Misalnya, penggunaan perangkap likat untuk memantau hama serta aplikasi nematisida dan fungisida secara bijak sesuai kebutuhan. Penyirangan dilakukan hanya pada awal pertumbuhan, karena akar bawang putih tergolong dangkal dan mudah rusak bila terganggu pada fase akhir.

Saat mendekati panen, ia mengingatkan, penyiraman dihentikan 20 hari sebelumnya untuk memperkuat kualitas umbi. Panen dilakukan saat tiga perempat daun menguning, dengan cara mencabut sambil mencongkel perlahan agar umbi tidak rusak. "Semua langkah ini dilakukan untuk menghasilkan bawang putih yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkualitas tinggi dan mampu disimpan lebih lama," tuturnya. **Herman/Yul**

Teknologi INA Agro-Garlic



Salah satu inovasi yang mendukung peningkatan produksi bawang putih datang dari IPB University, khususnya dari Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika dengan teknologi INA Agro-Garlic. Aplikasi berbasis Android dan web ini dapat membantu penilaian kesesuaian lahan untuk bawang putih.

"Pengguna utamanya adalah penyuluh pertanian lapangan (PPL), peneliti, petugas dinas, dan tentu saja para petani," ujarnya Guru Besar IPB University, Prof. Imas Sukaesih Sitanggang dan timnya mengembangkan INA Agro-Garlic saat seminar di Jakarta.

INA Agro-Garlic memiliki dua komponen utama, yaitu sistem berbasis mobile untuk digunakan di lapangan, dan platform web untuk manajemen data yang lebih luas. "Aplikasi ini hadir sebagai respons terhadap menurunnya produksi nasional berdasarkan data BPS, dari 45 ribu ton pada 2021 menjadi hanya

39,25 ribu ton pada 2023," ujarnya.

Penilaian dilakukan berdasarkan faktor statis seperti tekstur tanah, drainase, dan kemasaman, serta faktor dinamis seperti curah hujan dan lama penyinaran. Dalam penerapan, aplikasi ini mengkategorikan lahan dalam empat tingkat kesesuaian yakni sangat sesuai, cukup sesuai, sesuai marginal, dan tidak sesuai. Selain itu, fitur dokumentasi lapangan seperti foto kondisi tanaman dan tanah turut mendukung akurasi sistem.

Sistem ini kini mencakup data dari 17 kabupaten di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Aplikasi juga menyediakan rekomendasi budidaya bawang putih mulai dari pengolahan tanah, pemupukan, hingga pengendalian hama dan penyakit tanaman (OPT). "Ke depan, INA Agro-Garlic akan dikembangkan untuk komoditas hortikultura lainnya seperti cabai, jagung, kentang, dan bawang merah," tambahnya. **Herman/Yul**

Aroma Tak Sedap Harga Ayam di Pasar

Anomali harga ayam hidup di pasar menimbulkan kecurigaan. Aroma tak sedap adanya permainan pelaku usaha di pasar yang membuat harga ayam hidup (livebird) berada di bawah Harga Patokan Pemerintah (HPP). Jika dibiarkan, maka peternak mandiri bisa gulung tikar.



untuk keberlangsungan industri perunggasan nasional yang sehat dan adil. "Situasi ini tidak normal. Jika harga jual livebird terus berada di bawah HPP, maka akan mengancam keberlanjutan usaha peternak mandiri," tegas Agung.

Agung mengkhawatirkan, kondisi fluktuatif harga tersebut tidak hanya dipengaruhi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Namun juga oleh faktor nonteknis, seperti psikologi pasar dan praktik niaga yang tidak efisien. "Terdapat persoalan struktural dalam rantai pasok ayam hidup yang panjang dan didominasi oleh broker dengan margin perdagangan lebih dari 67 persen," tuturnya.

Satgas Pangan Turun Tangan

Sementara itu, Satgas Pangan akan mengawal ketat kebijakan pemerintah yang menetapkan harga Acuan harga ayam hidup sebesar Rp 18 ribu/kg berat hidup. Jika terbukti ada kecurangan, maka akan dilakukan penindakan secara tegas.

Satgas Pangan telah melakukan pemantauan di pusat penjualan livebird perusahaan integrator di wilayah Banten dan Jawa Barat. Hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya indikasi manipulatif di pasar, termasuk dugaan persengkokolan antara oknum peternak dan broker yang sengaja membentuk harga di bawah HPP.

"Ini adalah anomali pasar yang tidak bisa dibiarkan. Harga jual livebird harus mencerminkan biaya produksi yang adil," kata Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf saat memberikan penjelasan hasil rapat koordinasi dengan Dirjen Peternakan di Jakarta, Rabu (18/6).

Dirinya memastikan Satgas Pangan Polri akan mengawal ketat implementasi kesepakatan harga livebird dan tidak segan

menindak pelanggaran yang mengandung unsur pidana. Pelaku usaha yang terbukti mengarahkan pembentukan harga rendah dan cenderung merugikan pihak lain dapat dikategorikan sebagai perilaku monopoli, sehingga akan ditindak tegas secara hukum.

"Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atau perubahan harga secara sepihak yang mengandung unsur pidana, maka akan diambil langkah hukum, baik dalam bentuk sanksi pidana maupun administratif," tegasnya.

Sementara itu Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa menekankan pentingnya keseriusan pelaku usaha dalam menjaga kestabilan harga livebird. Bahkan ia menyoroti langkah stabilitas pasokan dan harga livebird tersebut dapat selaras dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan begitu, penyerapannya bisa lebih optimal, distribusi menjadi lebih merata, dan kesejahteraan peternak dapat meningkat secara berkelanjutan. "Ini adalah momentum penting untuk menyinergikan kebijakan pangan dengan kepentingan peternak rakyat," ujarnya.

Sebagai langkah panjang, Kementan terus mendorong implementasi Permentan No. 10 Tahun 2024 tentang proporsi distribusi DOC (day old chick) FS atau bibit ayam minimal 50 persen untuk peternak eksternal (mandiri). Sedangkan untuk internal dan kemitraannya maksimal 50 persen untuk internal.

Peraturan ini diharapkan dapat dipatuhi oleh semua pelaku usaha. Pemerintah juga mendorong pembentukan koperasi peternak sebagai bentuk penguatan posisi tawar peternak dalam rantai tata niaga livebird. **Yul**

Data Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) Indonesia per 16 Juni 2025, harga livebird di lapangan berkisar Rp15 ribu hingga 17 ribu per kilogram. Padahal Harga Patokan Pemerintah (HPP) di peternak berada dikisaran Rp16.935-17.646/kg.

Kementerian Pertanian kini berusaha memperkuat langkah stabilisasi harga ayam ras hidup untuk melindungi peternak rakyat dari tekanan harga jual yang tidak adil. Dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional yang digelar Rabu (18/6), seluruh pemangku kepentingan sepakat menetapkan

harga acuan ayam hidup di tingkat peternak sebesar Rp18 ribu/kg untuk semua ukuran bobot panen. Kebijakan itu, berlaku nasional mulai 19 Juni 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Agung Suganda, menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen negara melindungi peternak kecil dan mandiri. "Seluruh pihak telah menyepakati harga livebird paling rendah Rp18 ribu/kg sebagai bentuk perlindungan terhadap peternak mandiri dan usaha kecil," katanya.

Karena itu dirinya berharap semua pelaku usaha mematuhi harga kesepakatan. Sebab, keputusan ini merupakan hasil konsensus bersama



Sesuai Permentan No.10 Tahun 2024, peredaran DOC dengan klasifikasi FS petelur dari Pelaku Usaha Integrasi dan Pembibit PS yang melakukan budidaya kepada pelaku usaha mandiri, koperasi, dan peternak wajib memenuhi beberapa ketentuan.

Paling rendah 88% produksi DOC FS dari pelaku usaha integrasi dan pembibit PS dialokasikan untuk peternak.

Paling tinggi 10% produksi DOC FS dari pelaku usaha integrasi dan pembibit PS dialokasikan untuk pelaku usaha mandiri dan koperasi dengan kapasitas kandang paling rendah 300.000 ekor.

Paling tinggi 2% produksi DOC FS dari pelaku usaha integrasi dan pembibit PS dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan peternak mitra guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Sementara peredaran DOC dengan klasifikasi FS petelur dari Pembibit PS yang tidak melakukan budidaya wajib memenuhi beberapa ketentuan ketentuan

Paling rendah 90% produksi DOC FS dari pembibit PS dialokasikan untuk peternak.

Paling tinggi 10% produksi DOC FS dari pembibit PS dialokasikan untuk pelaku usaha mandiri dan koperasi dengan kapasitas kandang paling rendah 300 ribu ekor. **Yul**

Plus Minus Air Kelapa Muda

Air kelapa menjadi minuman alami yang bukan hanya dapat menghilangkan dahaga, tapi juga bermanfaat bagi kesehatan. Namun di balik manfaat tersebut, ternyata bagi penderita diabetes harus mewaspadai bahayanya jika mengonsumsi berlebihan.

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa air kelapa kaya manfaat. Dalam 1 cangkir atau sekitar 250 ml air kelapa murni, terkandung sekitar 60 kalori dan berbagai nutrisi, seperti karbohidrat, fosfor, kalsium, kalium, dan magnesium. Bahkan, air kelapa juga diketahui memiliki sifat antioksidan yang baik untuk kesehatan.

Kandungan elektrolit yang terdapat dalam air kelapa berfungsi untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh serta menjaga kadar cairan tubuh tetap seimbang. Ketika mengonsumsi air kelapa, secara tidak langsung kebutuhan harian elektrolit di dalam tubuh pun akan terpenuhi. Karena itu, kini banyak dipasarkan di pasar modern, berbagai merek minuman penambah energi air kelapa.

Manfaat lain air kelapa adalah mencegah dan mengatasi sembelit. Jumlah air dan elektrolit yang seimbang di usus bisa membuat kotoran menjadi lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Tak hanya itu, air kelapa juga memiliki efek pencakar alami, sehingga dapat melancarkan buang air besar. Namun, disarankan untuk minum air kelapa secukupnya karena terlalu banyak konsumsi air kelapa justru bisa menyebabkan diare.

Cegah Batu Ginjal

Nah manfaat lain yang perlu diketahui adalah membantu mengatasi penyakit ginjal. Batu ginjal merupakan salah satu gangguan paling umum dalam sistem saluran kemih, baik pada manusia maupun hewan kesayangan.

Pakar Biomedis IPB University, Dr Rini Madyastuti Purwono mengungkapkan, batu ginjal menempati urutan ketiga dalam masalah sistem urinari. Bahkan, kasusnya cenderung berulang dalam kurun waktu 5-10 tahun setelah kejadian pertama.

"Batu ginjal terbentuk dari akumulasi massa kristal dalam kondisi jenuh yang berlangsung lama di sistem urinari. Kristal ini dapat mengandung berbagai senyawa organik maupun anorganik seperti

kalsium, magnesium, fosfat, dan sel-sel yang luruh," kata Dr Rini seperti dikutip dari laman IPB.ac.id.

Menurutnya, keberulangan kasus ini menjadikan manajemen pencegahan sebagai langkah yang harus diprioritaskan. Ukuran massa batu ginjal yang besar dapat menyebabkan nyeri hebat, bahkan hingga pingsan akibat obstruksi (penyumbatan) di saluran urin.

Proses pembentukan batu ginjal atau urolithiasis sangat kompleks. Sebab, melibatkan ketidakseimbangan antara agen promotor seperti hiperkalsiuria, hiperfosfatemia, dan hipomagnesemia, serta faktor pH urin yang memengaruhi jenis batuan yang terbentuk. "Suasana asam cenderung membentuk batu kalsium oksalat, sementara suasana basa memicu terbentuknya batu jenis struvite, biasanya terkait dengan infeksi," katanya.

Dalam penelitian terbaru, Rini mengungkapkan, air kelapa terbukti memiliki potensi besar sebagai agen alami pencegahan pembentukan batu ginjal. Air kelapa mengandung magnesium, fosfat, kalium, sitrat, dan antioksidan yang berperan aktif dalam menghambat proses nukleasi hingga agregasi kristal penyusun batu ginjal.

Menurutnya, magnesium dalam air kelapa mampu bersaing dengan kalsium untuk membentuk magnesium oksalat yang lebih mudah larut. Fosfat juga membantu membentuk senyawa yang larut, mencegah kristal membesar.

Dr Rini yang juga sebagai dosen Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University menambahkan, kandungan kalium dan sitrat dalam air kelapa dapat membantu mengubah suasana urin dari asam menjadi basa, yang menguntungkan dalam pencegahan batu ginjal tipe kalsium oksalat. Selain itu, efek diuretik dari air kelapa meningkatkan volume urin sehingga mengencerkan konsentrasi mineral pembentuk batu.

Dalam uji praklinik yang dilakukan menggunakan hewan coba, pemberian air kelapa secara *ad libitum* menunjukkan hasil signifikan. Parameter seperti kadar



Blood Urea Nitrogen (BUN) dan kreatinin menurun, kerusakan nefron lebih rendah, serta tidak ditemukan endapan kristal dalam tubulus ginjal.

"Ini menjadi bukti kuat bahwa air kelapa dapat mencegah kekambuhan batu ginjal, terutama bila dikonsumsi rutin satu hingga dua cangkir per hari," katanya. Namun, Rini mengatakan manajemen alami hanya efektif untuk pencegahan atau batu berukuran kecil. Untuk batu ginjal berukuran besar, penanganan tetap harus melalui prosedur medis seperti operasi atau terapi Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) di rumah sakit.

Tingkatkan Gula Darah

Di balik manfaatnya, muncul kekhawatiran terkait dampaknya terhadap kadar gula darah, khususnya bagi pengidap diabetes. Ahli diabetes dari India, dr. Siva Sundar, mengungkapkan konsumsi air kelapa dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Dalam pengamatan pribadinya, terjadi peningkatan gula darah hingga 100 mg/dL hanya dalam waktu 30 menit setelah mengonsumsi air kelapa.

"Lebih baik berolahraga terlebih dahulu, lalu minum air kelapa secukupnya. Pengidap diabetes tetap bisa menikmati air kelapa, tapi harus paham risikonya," ujar dr. Siva dalam keterangannya, dikutip dari *Indian Express*, Selasa (13/5).

Sementara itu, ahli gizi dan

diet dari Rumah Sakit Marengo Asia Gurugram, Parmeet Kaur, menjelaskan, air kelapa mengandung gula alami berupa fruktosa dan glukosa, yang dapat meningkatkan kadar gula darah jika dikonsumsi secara berlebihan. "Secangkir (240 ml) air kelapa umumnya mengandung 6 hingga 7 gram gula. Meskipun tergolong memiliki indeks glikemik rendah, tetap saja, jumlah yang dikonsumsi menjadi faktor kunci," kata dr. Kaur.

Dalam konteks pengelolaan diabetes, dr Kaur mengatakan, semua asupan makanan dan minuman perlu diperhitungkan dengan cermat. Air kelapa, meski alami, bukan berarti bebas risiko. "Prinsip utamanya adalah keseimbangan. Jika dikonsumsi dalam jumlah wajar dan disesuaikan dengan kondisi individu, air kelapa tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat," tambahnya.

Sebagai langkah pencegahan, para ahli menyarankan agar penderita diabetes berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum menjadikan air kelapa sebagai konsumsi rutin. Aktivitas fisik seperti olahraga ringan juga direkomendasikan untuk membantu menjaga kestabilan gula darah.

Dengan demikian, meskipun air kelapa memiliki manfaat, pengidap diabetes tetap disarankan untuk bijak dalam mengonsumsinya agar tidak menimbulkan risiko kesehatan yang lebih besar. **Yul**

CEGAH PESTISIDA PALSU

Jaminan Hasil Panen dan Kesejahteraan Petani

Suatu hari, petani mengeluhkan pestisida yang dipakai tidak ampuh. Alih-alih mengendalikan hama tanaman, malah tanaman jadi tidak panen. Ia membeli pestisida dari penjual yang jualan berkeliling, dengan iming-iming harga lebih miring. Akhirnya, penyesalan yang dirasakan petani. Kesejahteraan keluarganya menjadi terancam karena tidak panen.

Mengapa bisa terjadi seperti itu? Besar kemungkinan pestisida yang dibeli petani tersebut palsu. Biasanya para pelaku penjual memanfaatkan kesempatan dan mengedarkan pestisida palsu, dengan merek yang banyak petani gunakan.

Namanya juga produk palsu, tentu kualitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tergur dengan harga yang lebih murah

dari harga di toko pertanian, penyesalanpun menghantui petani. Terus apa yang harus petani lakukan agar tidak tertipu lagi?

PT Fajar Nasional Cipta (FNC) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah melakukan "Sosialisasi Penggunaan Pestisida Secara Aman dan Bijak" pada Kamis, 12 Juni 2025 bertempat di Desa Temuroso, Kec. Guntur, Kab. Demak, Jawa Tengah. Kegiatan itu, dihadiri lebih dari 200 petani padi dan kacang hijau yang datang



dari 4 kecamatan di Demak yakni Kecamatan Guntur, Tegowanu, Karangawen dan Wonosalam.

Dalam kegiatan tersebut hadir sebagai pemateri yakni, Budi Hanafi, S.T., M.A.P, Ketua Kelompok Substansi Pengawasan-Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kementerian Pertanian; Asil Tri Yuniarti dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Dudy Kristyanto, Business Development Manager PT Fajar Nasional Cipta.

Acara dibuka dan dipandu Syarifah Nuly Nazlia, Direktur PT Fajar Nasional Cipta. Ia menjelaskan, FNC selalu mendukung program ketahanan pangan dengan membantu peningkatan produktifitas pertanian untuk menuju kesejahteraan petani. Dengan penyediaan produk-produk berkualitas, mulai dari produksi, distribusi hingga ke tangan petani sesuai kaidah yang baik, serta memenuhi harapan para petani.

Sebagai pertanyaan pemantik dilontarkan, bagaimana seharusnya cara menggunakan pestisida yang baik? Dudy Kristyanto, *Business Development Manager* FNC menekankan pentingnya penanganan pestisida secara aman dan bijak. Untuk itu, perlu mengikuti aturan 6 TEPAT yaitu; TEPAT Jenis, TEPAT Sasaran, TEPAT Dosis, TEPAT Waktu, TEPAT Cara dan TEPAT Mutu atau Kualitas.

Selain itu, dengan menerapkan 6 aturan emas keamanan pestisida yang disingkat **JEMPOL**, yaitu: (**J**)agalalah keamanan kerja; (**E**)ja dan cermati label; (**M**)aksimalkan pelindung; (**P**)estisida harus 6 tepat; (**O**)rang sehat suka kebersihan dan (**L**)akukan perawatan tangki.

Pestisida yang mutunya tepat adalah pestisida yang terdaftar resmi di Kementerian Pertanian, karena sudah melalui serangkaian pengujian hingga pestisida tersebut resmi terdaftar. Budi Hanafi, selaku Ketua Kelompok Substansi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kementerian Pertanian menjelaskan, prosedur pengawasan dan peredaran pestisida. Mulai dari kewenangan di tingkat

pusat, cara kerja pengawasan, tindakan yang dilakukan apabila ada kasus pemalsuan produk di lapangan, hingga pelaporan dan pengujian di laboratorium. Bahkan penindakan hukum bersama-sama dengan kepolisian terhadap pelaku pemalsu pestisida.

Untuk itu, Budi mengajak petani untuk mengenali produk lebih teliti dengan membaca label secara seksama, memahami nomor pendaftaran dan memperhatikan ciri kemasan agar terhindar dari produk palsu. Jika masyarakat atau petani menemukan indikasi pestisida palsu, maka dapat menyampaikan pengaduan melalui nomor 0812-1533-5574. "Nomor KP3 dapat menerima pengaduan 24 jam, petugasnya ada di ruangan saya," katanya.

Hal senada diungkapkan Asil Triyuniati, dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah terkait identifikasi yang mudah tentang produk asli atau palsu serta prosedur pengaduan masyarakat dan petani. Ia mengingatkan agar petani mewaspadai modus penyimpangan pestisida yang umum terjadi. Biasanya modus tersebut adalah produk palsu/imitasi, produk tanpa ijin edar/tidak terdaftar dan produk dengan komposisi yang tidak sesuai spesifikasi.

Banyak pertanyaan muncul terkait bagaimana mengidentifikasi produk FNC adalah asli atau palsu. Perwakilan FNC pun menjelaskan, ciri khusus kemasan dan keterangan yang ada label produk. Dengan memahami ciri tersebut, petani dapat mengenali dan memahami produk asli.

Pada saat penutupan acara, Budi menegaskan kembali dan mengajak masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan "Tugas pengawasan adalah tugas kita bersama, mulai dari pemerintah, produsen, distributor dan masyarakat petani," tegasnya. Mewakili Dinas Pertanian daerah, Asil Triyuniati berpesan agar petani selalu menggunakan pestisida secara aman dan bijaksana. **Adv**

PENJARA DAN/ATAU DENDA UNTUK PEMALSU/PENGEDAR PESTISIDA PALSU

- 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2019, Pasal 77, 123 dan 124
Penjara maksimal 7 tahun
Denda maksimal 5 Milyar Rupiah
- 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Penjara maksimal 5 tahun
Denda maksimal 2 Milyar Rupiah
- 3 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
a. Pasal 100 :
Penjara maksimal 10 tahun
Denda maksimal 5 Milyar Rupiah.
b. Pasal 102 :
Penjara maksimal 1 tahun
Denda maksimal 200 juta Rupiah.

Kerugian Menggunakan Produk Palsu

✗ Hama tidak terkendali ✗ Hama menjadi Kebal/Resisten ✗ Gagal Panen



Ingat!!!

- ✓ Teliti sebelum membeli
- ✓ Beli di Toko Resmi/Terpercaya
- ✓ Jangan tergiur harga murah

www.fnc.co.id

FNC

Kontak Pengaduan Pemalsuan :
- Hotline FNC +62 21-5222-322
- Hotline Sub Direktorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kementan +62 812-1533-5574



SinarTani
PERTANIAN INDONESIA BARU

Keluarga Besar Tabloid Sinar Tani Mengucapkan

Selamat Bertugas
Sudaryono Eng., M.M, MBA
Atas Amanah Barunya Sebagai
Komisaris Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero)

www.tabloidsinartani.com | tabloidsinartani | tabloidsinartani.com | @sinartaniST | SINTA TV | SINTA TV



SinarTani
PERTANIAN INDONESIA BARU

Selamat Tahun Baru Islam
1 Muharram 1447 H

www.tabloidsinartani.com | tabloidsinartani | tabloidsinartani.com | @sinartaniST | SINTA TV | SINTA TV

Anggrek Bulan, Sausan Ubah jadi Korset

Keindahan Anggrek Bulan (*Phalaenopsis amabilis*) tak hanya memikat mata, namun juga menginspirasi karya seni yang menawan. Bunga nasional yang dijuluki Puspa Pesona Bangsa Indonesia ini menjadi sumber ide segar bagi Sausan Rayhanisyafa.



Terinspirasi dari keindahan bunga angrek, Sausan seorang mahasiswi Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, akhirnya menciptakan karya tugas akhirnya berupa korset logam artistik. Dengan memadukan unsur seni logam dan fashion, Sausan menghadirkan interpretasi visual Anggrek Bulan dalam bentuk asesoris busana korset berbahan plat tembaga dan benang rajut.

Karya ini bukan sekadar simbol estetika, tetapi juga mencerminkan kekayaan hayati Indonesia, mengingat varietas bunga yang diangkat berasal dari Balai Pengujian Instrumen Tanaman Hias Segunung, Cipanas, Jawa Barat. Varietas ini bahkan diresmikan sebagai bunga nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1993.

Korset, yang dikenal sebagai busana penyangga tubuh agar terlihat ramping, menjadi media ekspresi Sausan dalam menggabungkan teknik seni logam dan rajut. Melalui pendekatan yang detail dan penuh ketekunan, Sausan menghadirkan korset bertema Anggrek Bulan dengan unsur estetika yang kuat dan pengerjaan teknis yang presisi.

Proses Pembuatan

Sausan mengungkapkan, proses pembuatan diawali dengan teknik tatah logam pada plat tembaga untuk membentuk elemen hias bunga. Proses ini mencakup beberapa tahap, mulai dari pembuatan jabung (alas padat dari getah damar dan kalsit), penataan desain, hingga

pembentukan kelopak bunga melalui teknik pemukulan dan pembengkokan logam.

Setelah bentuk logam selesai, dilakukan proses pelapisan chrome agar hasil akhir tampak mengkilap dan tahan karat. Logam kemudian dipadukan dengan elemen rajutan berupa sulur dan kelopak bunga yang dibuat menggunakan benang dan teknik crochet, menjadikan ornamen terlihat hidup dan dinamis.

Dalam tahapan berikutnya, Sausan merancang pola korset menggunakan kain organza, dipotong dan dijahit sesuai ukuran tubuh. Tak lupa, ia memasang tulangan atau boning, elemen wajib dalam struktur korset

yang berfungsi membentuk siluet tubuh. "Setiap elemen hias, baik dari logam maupun rajut, dijahit secara presisi ke bagian badan korset," ujarnya.

Hasil akhirnya adalah sebuah karya busana yang tak hanya fungsional, tetapi juga artistik perpaduan antara struktur yang kokoh dan sentuhan flora yang lembut.

Elisa, seorang penjahit profesional sekaligus narasumber dalam proyek ini, menegaskan pentingnya keberadaan tulangan dalam korset. "Tanpa tulangan, korset akan kehilangan bentuk dasarnya. Keputusan Sausan untuk mengintegrasikan struktur

ini membuktikan ketekunan dan keseriusannya dalam berkarya," ujarnya.

Karya Sausan bukan hanya sebuah proyek akademik, tetapi juga refleksi akan kekayaan budaya dan alam Indonesia. Melalui reinterpretasi Anggrek Bulan dalam bentuk busana modern, ia menyampaikan pesan bahwa seni dapat menjadi medium pelestarian warisan hayati dan identitas bangsa.

Korset berhias Anggrek Bulan ini menjadi bukti bahwa ketika alam dan kreativitas bersatu, lahirlah karya yang tidak hanya indah dipandang tetapi juga sarat makna.

Sausan/Herman

Mengenai Anggrek Bulan

Anggrek Bulan mendapat julukan Puspa Pesona bunga nasional Indonesia. Sebenarnya tanaman anggrek ini tersebar luas mulai dari Malaysia, Indonesia, Filipina hingga Australia. Cara hidupnya menempel pada batang atau cabang pohon di hutan-hutan, bahkan bisa juga dijumpai di pohon-pohon pekarangan rumah. Anggrek ini tumbuh subur hingga 600 meter di atas permukaan laut.

Anggrek Bulan termasuk dalam tanaman yang menyukai sedikit cahaya matahari sebagai penunjang hidupnya. Daunnya berwarna hijau dengan bentuk memanjang. Akar-akarnya berwarna putih dan berbentuk bulat memanjang serta terasa berdaging. Bunganya

sedikit beraroma harum. Umumnya bunganya berwarna putih, berukuran sedang.

Anggrek Bulan memiliki waktu mekar yang cukup lama, serta dapat tumbuh hingga diameter 10 cm lebih. Anggrek bulan menjadi bibit utama silangan anggrek di dunia. Anggrek Bulan memiliki peluang besar untuk dibudidayakan, karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Banyak orang menyukai Anggrek Bulan karena bentuk bunganya yang sederhana, namun anggun dan kharismatik.

Namun salah satu masalah budidaya Anggrek Bulan adalah ketersediaan benih yang seragam dan berkualitas masih terbatas. Padahal kebutuhan pasar adalah permintaan terhadap bibit Anggrek Bulan yang



berkualitas dan dalam jumlah besar.

Masalah bibit yang kurang tersedia, karena sampai kini pembibitan Anggrek Bulan masih dengan metode perbanyakan konvensional. Karena itu, diperlukan metode perbanyakan yang tepat, efisien dan cepat seperti kultur jaringan yang dapat menghasilkan bibit yang seragam dalam jumlah banyak. Yul

Pakan dari Limbah Kulit Kopi

Tingginya tingkat konsumsi kopi, menyebabkan limbah kopi juga meningkat, akibat proses pengolahan yang terus dilakukan. Dalam pemrosesannya, kopi akan menghasilkan 65% biji kopi dan 35% limbah kulit kopi. Ternyata limbah kopi tersebut masih bisa dimanfaatkan, salah satunya menjadi alternatif pakan ternak.

inovasi berbasis kearifan lokal kembali menggema dari kaki pegunungan Ciwidey. Tim Dosen IPB University, dipimpin Prof. Yuli Retnani, berhasil menyulap limbah kulit kopi yang selama ini menjadi sumber pencemaran lingkungan, menjadi pakan ternak yang bernilai ekonomis.

Melalui program Dosen Pulang Kampung, pengabdian ini menjadi jembatan antara hasil riset kampus dan solusi nyata di desa. Selama bertahun-tahun, limbah kulit kopi atau coffee pulp di Desa Margamulya, Kecamatan Pasir Jambu, hanya menjadi tumpukan sampah yang menimbulkan bau tak sedap.

Setiap musim panen, sekitar 8 ton buah kopi diproses, dan 60 persen di antaranya adalah kulit kopi yang terbuang sia-sia. Tanpa pengolahan yang memadai, limbah ini kerap mencemari tanah dan saluran air, apalagi saat musim hujan.

Bekerja sama dengan BUMDes Raharja Margamulya, tim dosen IPB meluncurkan program pengolahan limbah kulit kopi menjadi pakan

ternak jenis mash untuk kambing. Langkah ini menjadi respons atas keresahan warga dan peternak lokal yang ingin memanfaatkan potensi desa secara berkelanjutan.

"Setiap hari, ada sekitar 5 ton kulit kopi yang dihasilkan. Kalau ini bisa diolah jadi pakan, tentu akan sangat membantu peternak dan juga lingkungan," ujar Wawan Wiwaha Insan, Direktur BUMDes Raharja Margamulya.

Teknologi Sederhana

Proses pengolahan kulit kopi menjadi pakan ternak ternyata tak serumit yang dibayangkan. Kulit kopi cukup dikeringkan di bawah sinar matahari, kemudian digiling menggunakan grinder hingga berbentuk mash. Produk ini kemudian dicampurkan dalam pakan kambing secara berseling dengan hijauan.

Dari segi nutrisi, kulit kopi kering kaya serat kasar dan energi, cocok untuk sistem pencernaan ruminansia seperti kambing. Uji coba di lapangan membuktikan, kambing tetap menyukai mash kulit kopi



tanpa penurunan nafsu makan.

Bahkan bobot tubuh mereka naik secara normal, menjadikan pakan alternatif ini solusi yang ekonomis dan fungsional. "Penting untuk mengatur dosisnya, supaya tidak kelebihan serat kasar. Tapi sejauh ini hasilnya sangat menjanjikan," jelas Prof. Yuli.

Manfaat program ini tidak berhenti di kandang ternak. Volume limbah kopi di Desa Margamulya mulai menurun drastis, bau menyengat yang biasa tercium di jalanan pun kini hampir tak ada. Risiko pencemaran air dan tanah juga berkurang signifikan.

Model ini membuktikan bahwa pendekatan ekonomi sirkular, mengubah limbah jadi sumber daya untuk bisa menjawab masalah lingkungan sekaligus membuka peluang usaha baru. Saat ini BUMDes

Margamulya tengah mempersiapkan produksi pakan mash dalam skala yang lebih besar. Harapannya, produk ini bisa menembus pasar peternak di desa-desa lain yang membutuhkan alternatif pakan murah dan berkualitas.

Dengan dukungan IPB University, Ciwidey ditargetkan menjadi desa percontohan nasional dalam pengolahan limbah kopi berkelanjutan. Model ini berpotensi diadopsi oleh daerah penghasil kopi lainnya seperti Garut, Temanggung, hingga Gayo di Aceh.

Tidak hanya menciptakan solusi lokal, pengolahan kulit kopi ini juga membawa angin segar dalam dunia pertanian dan peternakan nasional. Sebuah langkah kecil dari desa yang punya gema besar bagi masa depan keberlanjutan Indonesia. **Gsh**

Komersialisasi E-PAPER SinarTani

E-paper Sinartani sudah berjalan selama 2 tahun dan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Sinartani versi cetak. E-paper Sinartani terbit tiap minggu, 48 kali setahun, terdiri dari 20-24 halaman sekali terbit. Informasinya mencakup issue-issue yang lebih melebar, selain pertanian juga mencakup informasi umum dan humaniora.

Sampai saat ini e-Paper Sinartani masih didistribusikan secara gratis ke semua penyuluh. Kini, waktunya E-Paper yang sudah dikenal oleh penyuluh dan petani itu mulai dijual secara komersil dengan harga yang teramat murah, yaitu Rp 1.500/edisi atau Rp 72.000/tahun.

Mudah-mudahan upaya ini merupakan sinergi yang baik antara pembaca dengan penerbit Sinartani yang tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas Sinartani agar lebih bermanfaat dan sekaligus memberi bahan bacaan yang baik bagi pembacanya.

Para pembaca yang ingin berlangganan dipersilahkan mengirimkan nama dan nomor HP-nya, melalui WhatsApp ke Sdr Wawan (081216304232) serta mentransfer biaya tahunan sebesar Rp 72.000 ke Rekening Sinartani: Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413



BERLANGGANAN

E-paper Tabloid Sinartani

Hanya dengan
Rp. 72.000 / Tahun

HUBUNGI :
0813 1757 5066

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

KAMI MENJANGKAU LEBIH LUAS

Di SPIEF, Presiden Prabowo Tegaskan Kemandirian Pangan

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan kemandirian pangan merupakan prioritas tertinggi pemerintahannya dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal ini disampaikannya dalam pidato kenegaraan pada St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, yang dihadiri pemimpin dunia dan tokoh ekonomi lintas kawasan.



“Kewajiban pertama sebuah pemerintahan adalah melindungi rakyatnya dari kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan akibat lingkungan yang menantang,” tegasnya. Lebih lanjut prioritas yang diambil diimplementasikan pada jajaran di kabinet Merah Putih yang dipimpinnya untuk melaksanakan amanat swasembada pangan.

Dalam forum internasional prestisius yang mempertemukan pemimpin dari Barat, Timur, dan Global South tersebut, Presiden Prabowo menggambarkan urgensi pembangunan pertanian nasional dalam konteks pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat. “Setiap tahun, ada lima juta warga baru yang harus diberi makan. Itu berarti, setiap tahun, Indonesia

harus menyediakan pangan bagi satu negara sebesar Singapura,” ujarnya.

Presiden juga mengungkapkan pencapaian luar biasa dalam sektor pertanian selama tujuh bulan masa pemerintahan. “Kami berhasil meningkatkan produksi beras dan jagung sekitar 50 persen, dan saat ini cadangan beras nasional di gudang pemerintah mencapai 4,4 juta ton, cadangan terbesar dalam sejarah Republik Indonesia,” jelasnya.

Capaian ini menurutnya merupakan hasil dari kebijakan efisiensi, pemberantasan korupsi, serta deregulasi yang memangkas aturan-aturan tidak efektif dalam sektor pertanian dan distribusi pangan. Bahkan lebih jauh, Prabowo menyampaikan perlunya filsafat pembangunan nasional yang tidak hanya mengikuti arus ekonomi global, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan budaya lokal.

Namun Prabowo mengkritisi dampak negatif dari dominasi ideologi pasar bebas yang dalam beberapa dekade terakhir diikuti oleh banyak negara Asia Tenggara. “Kami tidak akan mengikuti satu kutub ekstrem. Kami memilih jalan tengah, menggabungkan semangat inovasi kapitalisme dan peran intervensi pemerintah untuk melindungi yang lemah,” katanya.

Dalam konteks pertanian, hal ini berarti keberpihakan negara kepada petani kecil, subsidi dan dukungan produksi, serta proteksi dari ketimpangan pasar. “Kita ingin memastikan bahwa keberhasilan ekonomi bukan hanya dinikmati oleh 1% orang terkaya. Kita ingin kesejahteraan dinikmati oleh sebanyak-banyaknya rakyat,” ujarnya mengutip filosofi yang dianut pemerintahannya, “*The greatest good for the greatest many.*”

Sementara itu, Menteri Pertanian

Andi Amran Sulaiman yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatannya ke Rusia lebih jauh mengungkapkan bahwa pemerintah sesuai Astacita Presiden Prabowo memfokuskan pada kemandirian pangan. Hal ini demi menjaga kesiapan Indonesia memainkan peran yang lebih besar dalam sistem pangan global.

Menurut Amran, banyak negara yang sedang mengalami tekanan pangan, sementara itu Indonesia justru mencatatkan peningkatan produksi yang signifikan. Pemerintah katanya melalui berbagai kebijakan menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas utama.

“Kita tidak lagi hanya bicara swasembada, tapi sudah bicara kedaulatan. Dengan hasil yang terlihat saat ini, Indonesia secara tidak langsung siap mengambil peran lebih besar dalam sistem pangan dunia,” tegas Amran. **Yul**

RI-Belanda Teken Kerjasama Pertanian Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia dan Belanda resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pertanian berkelanjutan, hortikultura, teknologi greenhouse, hingga peningkatan kapasitas generasi muda petani. Penandatanganan ini dilakukan antara Kementerian Pertanian RI dengan Kementerian Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Belanda, di Kantor Pusat Kementan RI, Jakarta, Selasa (17/6).

Sebagai informasi, MoU yang disepakati Indonesia dan Belanda ini bertujuan untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi antara kedua negara di bidang pertanian, alam dan keanekaragaman hayati, pembangunan pedesaan, serta agribisnis.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi Belanda yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Belanda, Guido Landheer. Delegasi tersebut terdiri dari perwakilan pemerintah, pelaku usaha, serta penyedia teknologi pertanian.

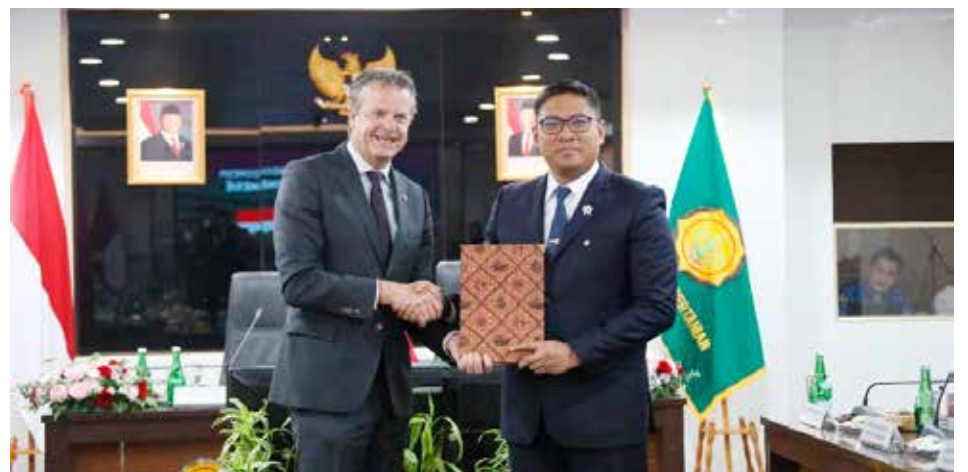
Wamentan Sudaryono atau

yang akrab disapa Mas Dar ini mengungkapkan, sejumlah perusahaan Belanda sebelumnya telah berminat untuk berinvestasi di sektor pertanian Indonesia, meskipun sempat menghadapi beberapa kendala. Melalui MoU ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi mitra asing yang membawa manfaat nyata bagi petani dan masyarakat.

“Kami ingin segera merealisasikan kerja sama ini. Kementerian Pertanian Indonesia sangat antusias. Apalagi, Belanda memiliki reputasi sebagai pengeksport pertanian terbesar kedua di dunia, meskipun (luas) negara kecil. Itu luar biasa dan menjadi inspirasi bagi kami,” tambah Sudaryono.

Wamentan Sudaryono menekankan pentingnya transfer pengetahuan di bidang hortikultura, teknologi greenhouse, benih unggul, dan sistem irigasi modern. Hal ini dilakukan untuk terus menjaga momentum peningkatan sektor pertanian di Indonesia.

Sementara itu, Wamen Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Belanda, Guido Landheer, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari pemerintah Indonesia.



la menyebut kunjungan ini sebagai bukti hubungan erat dan historis antara kedua negara.

la menegaskan misi delegasi Belanda adalah untuk berbagi pengetahuan dan bekerja sama dalam meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. “Mereka semua hadir untuk berbagi pengetahuan, sekaligus bekerja sama dengan petani dan pemerintah Indonesia untuk melangkah lebih jauh dalam misi ketahanan pangan,” kata Guido.

Guido juga menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya dan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam

mewujudkan swasembada pangan. Apalagi, ketahanan pangan merupakan isu global yang sangat krusial. Karena itu, melalui MoU Indonesia-Belanda, kedua negara sepakat untuk berbagi pengetahuan dan membangun kapasitas produksi petani lokal secara berkelanjutan.

“Kami tidak datang untuk mengeksport produk seperti tomat ke Indonesia, melainkan untuk berbagi pengetahuan agar petani Indonesia dapat memproduksi sendiri dengan teknologi yang tepat. Kami juga ingin belajar dari pengalaman Indonesia. Ini adalah kolaborasi dua arah,” katanya. **Yul**

**H. Prabowo Subianto**

KETUA DEWAN PEMBINA DPN HKTI

**Manimbang Kahariady**

SEKRETARIS JENDERAL DPN HKTI

**H. Fadli Zon**

KETUA UMUM DPN HKTI

**Andi Iwan Aras**

BENDAHARA UMUM DPN HKTI

Kongres TANI IX MUNAS X HKTI

"HKTI MEWUJUDKAN PERTANIAN MODERN DAN STRUKTUR PERDESAAN MAJU"

LAHIRNYA PEMIMPIN BARU

**AGENDA ACARA**

- Munas X HKTI
- Kongres Tani IX
- Tani Fest
- Saresehan Tani
- Business Matching
- Gerakan Pangan Murah (GPM)



PRASETYA ADHI P : 0813-8126-2208

CATAT TANGGALNYA !

24-26 JUNI 2025

Auditorium Kementerian
Pertanian Republik Indonesia



Hkti_org



HKTI



HKTI Official



HKTI Official